



- 4) Penempatan dan pengembangan karir PNS belum berdasarkan pola karir;
- 5) Anggaran pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan belum optimal;

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Masih kurangnya cara baru melalui pengembangan penerapan praktis dalam konteks IPTEK lingkup penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Masih kurangnya informasi hasil-hasil kelitbang;
- 3) Perlu pembentukan OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5. Fungsi Penunjang Lainnya

Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mencakup Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung.

- a. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat dengan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan yaitu:
 - 1) Belum maksimalnya implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 2) Perlunya peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
 - 3) Perlunya penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Fungsi Pendukung antara lain penyelenggaraan kinerja pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui capaian nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Isu Strategis yang menjadi dasar pembangunan utama periode 2021-2026 didasari oleh uraian permasalahan diatas dikelompokkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Isu Strategis

4.2.1. Isu Internasional

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;



8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Pandemi Corona Virus (Covid-19)

Merebaknya Pandemi Covid-19 di Indonesia, secara khusus di Sulawesi Utara yang melanda sejak tahun 2020, telah mempengaruhi semua tatanan kehidupan bermasyarakat, ekonomi dan pemerintahan. Dengan demikian, dalam perencanaan lima tahun kedepan tetap memperhitungkan dampak pandemi dimaksud. Oleh karena itu dalam penyusunan program dan kegiatan serta distribusi anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan tetap perlu melakukan penyesuaian dengan memperhatikan arah kebijakan serta tema pembangunan Nasional dan Provinsi disetiap tahun berjalan.

3. Konvensi Global terkait Perubahan Iklim



Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (*climate action*) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 2019 telah berhasil menyepakati *roadmap* untuk pijakan aksi bersama. *Roadmap* ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan *stake holders* lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak *roadmap* disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama-sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat diabad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (*unfoundation.org, 2020*).

Sesuai *roadmap* terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Berdasarkan *roadmap* tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20



dipastikan akan menjadi bagian dari negara-negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Terkait hal tersebut, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu upaya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (*smart*) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi *internet of things* (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “*disruption*” industri disetiap negara pada keseluruhan sistem. *Disruption* ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan diberbagai



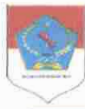
bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *financial technology (fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

5. Isue Kesetaraan Gender

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan.

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi.

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.



Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) baik perempuan maupun laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda.

6. Sasaran Global terkait Kesetaraan Gender

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun;
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan;



4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
5. Menjamin akses *universal* terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

4.2.2. Isu Nasional

1. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- f. Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;



- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
 - i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
2. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026.
 3. Harmonisasi dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2003 – 2023.

4.2.3. Harmonisasi dengan Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat ini, permasalahan dan peluang yang dihadapi dalam 20 Tahun mendatang maka, Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2005–2025 adalah: **“Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai barometer pembangunan ekonomi perdesaan berwawasan lingkungan di Indonesia Bagian Timur”** dengan 5 misi sebagai berikut:

VISI	MISI
“Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai barometer pembangunan ekonomi perdesaan berwawasan lingkungan di Indonesia Bagian Timur “	Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Sumber daya Manusia yang berbudaya dan berkualitas
	Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi local perdesaan yang berdaya saing tinggi sebagai barometer pembangunan desa
	Misi 3 : Mewujudkan kualitas pelayanan publik melalui kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan dengan prinsip good governance.
	Misi 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur.
	Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Bolaang Mongondow Timur sebagai kabupaten Hijau.

Gambar 4. 2 Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



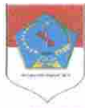
Untuk mencapai sasaran pembangunan maka pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah, tahapan, dan skala prioritas yang ditetapkan untuk mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Oleh karena itu penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode selanjutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan dan prioritas masing-masing misi menjadi prioritas utama.

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Tekanan skala prioritas dalam setiap tahunnya berbeda-beda namun semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 5 (Lima) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dipertajam kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Prioritas dalam masing-masing tahapan adalah mempersiapkan kelembagaan, menyiapkan dan membangun infrastruktur, meningkatkan infrastruktur dan pencapaian terhadap Visi. Atas dasar tersebut tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:



SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SETIAP RPJMD

FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJPD	RPJMD II 2010- 2015	RPJMD III 2015- 2020	RPJMD IV 2020- 2025	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJPD 2025
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					
Pertumbuhan PDRB	6,46 %	7,13	7,54	8,01	8,01
Pertumbuhan Ekonomi	6,78 %	6,86	6,91	7,00	7,00
PDRB per kapita (ADHB) juta	8,39	8,91	9,23	9,81	9,81
Angka Kemiskinan (%)	12	10	8	6	5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	13,90	11,87	10,21	8,23	8,23
IPM	71,49	73	75	78	78
PENDIDIKAN					
ANGKA MELEK HURUF (%)	98,41	98,45	98,62	98,80	98,80
ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	7,53	7,58	8,50	9,00	9,00
APM SD	95,70%	95,71%	96,78%	97,84%	97,84%
APM SMP	62,46%	68,95%	80,47%	87,50%	87,50%
APM SMA	49,00%	51,35%	75,62%	80,62%	80,62%
APK SD	111,30%	109,43%	109,20%	108,97 %	108,97%
APK SMP	80,05%	84,45%	91,18%	96,91%	96,91%
APK SMA	70,42%	72,29%	90,11%	95,25%	95,25%
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH SD	98,89%	98,89%	98,91%	99,02%	99,02%
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH SMP	77,65%	77,65%	79,88%	81,15%	81,15%
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH SMA	30,01%	30,14%	37,18%	38,12%	38,12%
Angka Putus Sekolah SD	0,16%	0,16%	0,14%	0,12%	0,12%
Angka Putus Sekolah SMP	0,38%	0,36%	0,23%	0,18%	0,18%
Angka Putus Sekolah SMA	2,08%	2,02%	1,95%	1,67%	1,67%
Prosentase Bangunan Sekolah SD Dalam Keadaan Baik	19,46%	38,12%	64,16%	66,07%	66,07%
Prosentase Bangunan Sekolah SMP Dalam Keadaan Baik	20,57%	38,81%	59,76%	72,34%	72,34%
Prosentase Bangunan Sekolah SMA Dalam Keadaan Baik	42,16%	64,86%	73,23%	76,26%	76,26%
Ratio Guru:Murid SD	3,60%	4,23%	23,22%	48,23%	48,23%
Ratio Guru:Murid SMP	5,26%	26,22%	37,29%	41,01%	41,01%
Ratio Guru:Murid SMA	15,68%	16,78%	34,56%	40,12%	40,12%
Persentase Guru tamat S1/DIV	64,01%	65,13%	76,15%	86,24%	86,24%
Persentase Guru Bersertifikasi	44,87%	44,87%	52,12%	68,00%	74,15%



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

KESEHATAN					
Angka Kelahiran Hidup Bayi	858	875	880	885	885
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	67	70	72	74	75
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,3	0,27	0,26	0,25	0,25
Ratio posyandu per satuan balita	1/258	1/210	1/180	1:160	1/150
Cakupan pertolongan oleh nakes	92%	93%	94%	95%	95%
Ratio angka kelangsungan hidup bayi	3:1000	2:1000	1:1000	0:1000	0:1000
Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	58,5%	60%	75%	80%	85%
Ratio rumah sakit per satuan penduduk	NA	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
Ratio tenaga dokter per satuan penduduk	NA	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk	NA	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
Persentase Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase cakupan balita mendapatkan vitamin A dosis tinggi	94,33%	95%	96%	98%	97%
Persentase cakupan rumahtangga mengkonsumsi garam beryodium	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase cakupan kunjungan bayi	90%	92%	95%	97%	100%
Prosentase cakupan pelayanan anak balita ditimbang	90%	92%	95%	97%	100%
Presentase cakupan Desa Universal Child Immunization	90%	92%	95%	97%	100%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria	42 KASUS	40 KASUS	37 KASUS	30 KASUS	30 KASUS
Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC (BTA+)	108 KASUS	98 KASUS	75 KASUS	70 KASUS	70 KASUS
Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita DBD	5306 PENDERITA A	MENURUN	MENURUN	MENURUN	MENURUN
Cakupan Penemuan dan Penanganan Rabies	26 KASUS	20 KASUS	15 KASUS	5 KASUS	5 KASUS
KETENAGAKERJAAN					
Pengangguran (%)	12%	10%	9%	8%	7%
Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	8 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	10%	7%	6%	5%	5%
PEMUDA DAN OLAHRAGA					
Jumlah Club Olahraga	5	10	20	25	25
Jumlah Gedung Olahraga	-	2	4	5	5
PEKERJAAN UMUM					
Panjang Jalan Kab dalam Kondisi Baik	86,4 Km dari 494,9 KM	20%	25% Saat ini : dari 494,9 KM	30%	



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

			jalan kabupaten maka jalan Kondisi baik : 88,21 KM Dlm kondisi sedang : 25,29 KM Rusak Ringan : 58,49 KM Rusak berat :		
Prosentase Rumah Layak Huni	55%	60%	65%	70%	
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	112 Km	134 Km	136 Km	151 Km	151 Km
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	224 Km	45%	50%	55%	
Akses air bersih	40%	45%	50%	55%	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Belum ada	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Belum ada	Tersedia, Tepat Waktu	Tersedia, Tepat Waktu	Tersedia, Tepat Waktu	Tersedia, Tepat Waktu
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Belum ada	100%	100%	100%	100%
PERHUBUNGAN					
2. Jumlah arus penumpang angkutan umum	NA	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
3. Jumlah terminal	2	Sesuai RTRW Kab. BOLMONG	Sesuai RTRW Kab. BOLMONG	Sesuai RTRW Kab. BOLMONG	Sesuai RTRW Kab. BOLMONG
4. Rasio ijin trayek	-	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
5. Jumlah uji kir angkutan umum	-	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM

f



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase Penanganan Sampah	25%	60%	75%	85 %	85 %
6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	25%	30%	35%	45%	45%
7. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	15%	20%	28%	30%	35%
Pencemaran status mutu air	NA	Tidak Melewati Standar Ambang Batas Pencemaran	Tidak Melewati Standar Ambang Batas Pencemaran	Tidak Melewati Standar Ambang Batas Pencemaran	Tidak Melewati Standar Ambang Batas Pencemaran
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	NA	10%	15%	20%	20%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	50%	70%	80%	90%	90%
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	NA	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
Penegakan hukum lingkungan	NA	70%	80%	100%	100%
8. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					9.
10. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	70%	80%	90%	100%	11. 100 %
12. Rasio bayi berakte kelahiran	60%	85%	95%	100%	13. 100 %
14. Rasio pasangan berakte nikah	60%	85%	95%	100%	15. 100 %
16. Kepemilikan KTP	70%	80%	90%	100%	17. 100 %
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	70%	80%	90%	100%	18. 100 %
Ketersediaan database kependudukan	NA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	65%	85%	95%	100%	100%
19. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
20. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	NA	30%	35%	40%	45%
21. Partisipasi perempuan di	NA	30%	35%	40%	45%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026

lembaga swasta					
22. Rasio KDRT	NA	3%	2%	1%	1%
23. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	NA	0,8%	0,3%	0,1%	0,1%
Partisipasi angkatan kerja perempuan					
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	70%	80%	85%	90%	90%
24. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					
25. Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	3	3	2	2
26. Rasio akseptor KB	31.450	34.750	36.500	38.750	41.250
Cakupan peserta KB aktif	74%	75%	77%	79%	82%
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	38,17%	38	30%	25%	20%
27. SOSIAL					
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	NA	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM	Sesuai SPM
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	60%	70%	80%	85%	85%
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	60%	70%	80%	85%	85%
28. KETENAGAKERJAAN					
29. Angka partisipasi angkatan kerja	778	371	583	793	793
30. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	22	7	15	15	15
Tingkat partisipasi angkatan kerja	39,00	185,5	291,5	396,5	396,5
Pencari kerja yang ditempatkan	128	-	270	344	344
Keselamatan dan perlindungan	20	60	70	75	75
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	-	-	-	-
31. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
32. Persentase koperasi aktif	52	74	0	0	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026

33.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	3756	275	0	0	
34.	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	
35.	Usaha Mikro dan Kecil	6151	1500	0	0	7651
36.	PENANAMAN MODAL					
37.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
38.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)					
39.	Rasio daya serap tenaga kerja					
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)					
40.	KEBUDAYAAN					
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	0	5	10	10
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	5	10	15	15
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	0	4	6	6
41.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
42.	Jumlah organisasi pemuda	60%	65%	70%	75%	75%
43.	Jumlah organisasi olahraga	75%	80%	90%	95%	95%
44.	Jumlah kegiatan kepemudaan	-	4 Keg	6 Keg	8 Keg	8 Keg
45.	Jumlah kegiatan olahraga	-	3 Keg	5 Keg	7 Keg	7 Keg
	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	-	-	-	-	-
	Lapangan olahraga		110 Lap	115 Lap	120 Lap	120 Lap
46.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI					
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	13LSM, Ormas dan OKP	13	15	20	Terbinanya LSM, Ormas dan OKP Yang terdaftar
	Kegiatan pembinaan politik daerah	12 Partai Politik yang mendaftar saat	12	12	12	Terbinanya partai politik peserta pemilu



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

	pemilu				
47. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk					
48. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1000 linmas/ 282.820 penduduk	35/10000	42/10000	42/10000	
49. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	1 Pos Siskamling di tiap desa (jumlah desa 200 desa)	1/202	2/202	2/202	Tersedia a pos siskamling sesuai kebutuhan
Penegakan PERDA					
Cakupan patroli petugas Satpol PP					
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Sesuai laporan masyarakat	Sesuai laporan masyarakat	Sesuai laporan masyarakat	Sesuai laporan masyarakat	Sesuai laporan masyarakat
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1000 petugas linmas	1000 petugas linmas	1200 petugas linmas	1200 petugas linmas	Setiap desa memiliki 6 petugas linmas
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten					
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik					
Sistim Informasi Manajemen Pemda					
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat					
50. KETAHANAN PANGAN					
Regulasi ketahanan pangan					
Ketersediaan pangan utama	10 Ton	15 Ton	25 Ton	40 Ton	40 Ton
51. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		3	6	10	19
52. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		3	3	3	3
53. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	15	15	20	20	20



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026

54.	Jumlah LSM		3	6	10	19
	LPM Berprestasi		3	5	10	18
55.	PKK aktif		15	15	15	15
	Posyandu aktif		198	198	198	198
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		3	15	30	48
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat		3	15	30	48
56.	STATISTIK					
	Buku "kabupaten dalam angka"					
	Buku "PDRB kabupaten"					
57.	Kearsipan					
	Pengelolaan arsip secara baku					
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan					
58.	Komunikasi dan Informatika					
59.	Jumlah jaringan komunikasi					
60.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk					
61.	Jumlah surat kabar nasional/lokal					
62.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal					
	Web site milik pemerintah daerah					
63.	Pameran/expo					
64.	PERPUSTAKAAN					
65.	Jumlah perpustakaan	15	15	15	15	15
66.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		23.500	23.500	24.000	
67.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		16.308 Exp	81.540 Exp	244.620 Exp	
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN					
68.	PERTANIAN					
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Padi 51,28	Padi 56,84	Padi 56,91	Padi 56,98	



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

per hektar	Jagung 29,61 Kedelai 12,65	Jagung 29,76 Kedelai 13,51	Jagung 39,82 Kedelai 13,75	Jagung 40,01 Kedelai 13,87	
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB					
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	46,5	47,88	47,91	47,95	
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB					
Cakupan bina kelompok petani					
NTP	Padi Jagung Kedelai	Padi Jagung Kedelai	Padi Jagung Kedelai	Padi Jagung Kedelai	
69. KEHUTANAN					
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	64.929,42 Ha	8.398 Ha	10.000 Ha	10.000 Ha	36.532,42 Ha
Kerusakan Kawasan Hutan	10.994,47 Ha	560 Ha	3.000 Ha	3.500 Ha	3.500 Ha
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB					
70. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
Pertambangan tanpa ijin					
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB					
71. <u>BIDANG GEOLOGI</u>	Terjadinya perluasan pertambangan kab. Bolaang mngondow	85%	85%	100%	Terlaksananya perluasan peta bencana alam geologi di kab. Bolaang Mongondow Timur
72. Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi					
73.					
74. <u>BIDANG PERTAMBANGAN</u>	Tercapainya yang baik pembinaan dan pengawasan pertambangan yang baik	95%	95%	100%	Terlaksananya pembinaan pengawasan pertambangan di kab. Bolaang Mongondow Timur
75. Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C					
76. Sosialisasi regulasi bahan galian golongan C	Terwujudnya informasi mengenai bahan	95%	95%	100%	Tercapainya regulasi mengenai bahan galian C di
Pertumbuhan Industri.	4,05%	4,05%	4,20%	4,35%	4,35%
Cakupan bina kelompok pengrajin	20 Kelompok	20 Kel	70 Kel	120 Kel	120 Kel



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

	galian golongan C yang baik				kab. Bolaang Mongondow Timur
77. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dilaksanakan pengawasan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat	85%	85%	100%	Tercapainya pengawasan kerusakan akan dampak lingkungan akibat pertambangan rakyat
78. BIDANG ENERGI					
79. Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan	Peningkatan investasi dalam pemanfaatan sumber energi	85%	85%	100%	Terpenuhnya energy listrik pada masyarakat di kab. Bolaang Mongondow Timur
80. PARIWISATA					
Kunjungan wisata	0	1300	3000	6000	6000
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0	6.500.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
81. KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Produksi perikanan	9,841	15,900	22,326	27,422	27,422
Konsumsi ikan	36,7	40,9	44,7	48,4	48,4
Cakupan bina kelompok nelayan	250	332	426	521	521
NTN	107,6	111,2	114,6	118,2	118,2
Produksi perikanan kelompok nelayan					
82. PERDAGANGAN					
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,44%	8,78%	10,43%	12,08%	12,08%
Ekspor Bersih Perdagangan	0	0	0,50%	1%	1%
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	40 Kelompok	47 Kel	62 Kel	100 Kel	100 Kel
83. PERINDUSTRIAN					
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	2,35%	2,50%	2,65%	2,80%	2,80%
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	1,17%	1,25%	1,32%	1,40%	1,40%

4. Penelaahan terhadap RPJMD daerah lain

Penelaahan terhadap RPJMD daerah lainnya diperlukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program-program yang memiliki kesamaan dengan program sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2021-2026. Hal ini penting dalam rangka membangun sinergitas pembangunan antar daerah dan provinsi Sulawesi Utara yang secara langsung akan bersinergi dengan pembangunan nasional sesuai RPJMN 2018-2024.



5. Penelahaan terhadap Rancangan KLHS

Terkait dengan Rancangan KLHS diperlukan dalam rangka untuk mengkaji dampak penting yang berhubungan dengan upaya meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan buruk dari seluruh aspek pembangunan, sehingga pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam dokumen KLHS permasalahan dirumuskan berdasarkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017, sebagai komitmen dan bagian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 2017-2021 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Secara umum, TPB yang dikembangkan di Indonesia terdiri atas 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan sebanyak 220 indikator. Jumlah indikator TPB yang pencapaian targetnya berstatus “dilaksanakan dan mencapai target” (SS) dan “tidak ada target tetapi tercapai” (TTC) sebanyak 123. Hal ini berarti pencapaian TPB di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih belum optimal, yaitu sebesar 56%.

4.2.4. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026

Adapun isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah:

1. Isu strategis tata kelola pemerintahan:
 - a) Pemantapan reformasi birokrasi yang diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
 - b) Peningkatan efisiensi, efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik;
 - c) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu;
 - d) Penguatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan percepatan pencapaian SPM bidang penataan ruang meliputi informasi pemanfaatan ruang,



- pelibatan masyarakat dalam penataan ruang, perizinan pemanfaatan ruang, pengaduan tata ruang dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e) Pemantapan kelembagaan pemerintah efektif, efisien dan sinergis;
 - f) Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date* dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik;
 - g) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan bersinergi serta konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - h) Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat;
 - i) Peningkatan pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dengan pencegahan tindak kriminal serta penegakan peraturan daerah;
 - j) Peningkatan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa;
 - k) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah;
 - l) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
2. Isu strategis kepariwisataan:
- a) Pengembangan sektor ekonomi produktif bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan kepariwisataan;
 - b) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
 - c) Pengembangan kewirasusahaan dan unggulan kompetitif UKM;
 - d) Pengembangan industri kecil dan menengah;
 - e) Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
 - f) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
 - g) Peningkatan sarana dan prasarana, SDM, investasi dan pengelola pariwisata;
 - h) Pengembangan pemasaran pariwisata;
 - i) Pengembangan destinasi pariwisata, pengelolaan keragaman budaya;
 - j) Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya;
 - k) Pengembangan Agrowisata dan Perikanan



3. Isu strategis pelayanan dasar masyarakat:
 - a) Penurunan angka *pravelensi stunting*;
 - b) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
 - c) Percepatan pembangunan sanitasi dan air bersih dalam rangka pencapaian akses 100%.
 - d) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 - e) Peningkatan pemenuhan hak seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas mulai tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi;
 - f) Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan pasangan usia subur melalui kursus serta mengadakan pembinaan terhadap keluarga rentan masalah;
 - g) Penerapan P3MB (*Pro Poor Planning, Budgeting dan Monitoring*) ke dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran;
 - h) Penanggulangan kemiskinan kabupaten;
 - i) Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu;
 - j) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
 - k) Peningkatan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - l) Peningkatan kualitas serta prestasi pemuda dan olahraga;
 - m) Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif, transparan dan akuntabel;
 - n) Peningkatan Kesepesertaan Masyarakat dalam BPJS.
4. Isu strategis pembangunan berwawasan lingkungan:
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - b) Penerapan teknologi tepat guna dimasyarakat dan pemberdayaan kepada kelompok;
 - c) Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan daerah;
 - d) Peningkatan penanganan pasca panen dan industri hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan



- perikanan/kelautan;
- e) Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - f) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - g) Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan;
 - h) Peningkatan kapasitas informasi dan teknologi sistem produksi;
 - i) Pengembangan sentra-sentra industri potensial/ penataan struktur industri;
 - j) Pemeliharaan, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan ruas kabupaten, kecamatan, poros desa akses menuju kawasan wisata, potensi ekonomi strategis dan perbatasan;
 - k) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi sarana prasarana jaringan irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi dan peningkatan SDM;
 - l) Pembangunan infrastruktur pedesaan;
 - m) Peningkatan iklim investasi dan pengembangan ekonomi lokal;
 - n) Peningkatan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
 - o) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
 - p) Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana;
 - q) Pengembangan RTH dalam mendukung program kota di kawasan perkotaan Tutuyan;
 - r) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan perlindungan konservasi sumberdaya alam;
 - s) Pengendalian kebakaran hutan;
 - t) Pengembangan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan;
 - u) Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat berpotensi merusak lingkungan;
 - v) Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat terkait kebencanaan;
 - w) Pencegahan dan mitigasi bencana serta tanggap darurat bencana.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur periode tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
YANG AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA MELALUI
SINERGITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN"**

Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki makna dan pengertian yang dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR YANG AMAN

Merujuk pada maksud dari visi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2005-2025, maka makna dan pengertian dari AMAN yakni: kemampuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, toleransi antar umat beragama serta kenyamanan hidup komunitas.

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR BERBUDAYA

1. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara.



3. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah Bolaang Mongondow Timur sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat.

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR SEJAHTERA

Adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam semua aspek pembangunan akan menunjang ketahanan ekonomi wilayah yang disertai ketahanan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

SINERGITAS PEMBANGUNAN DESA

Sinergitas pembangunan desa merupakan keterpaduan dalam proses pembangunan yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai kunci utama yang dapat mewujudkan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Perwujudan visi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 perlu memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024 maupun RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 sebagaimana dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

VISI NASIONAL		VISI PROVINSI SULAWESI UTARA		VISI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
RPJPN	RPJMN	RPJPD	RPJMD	RPJPD	RPJMD
2005-2025	2020-2024	2005-2025	2021-2026	2005-2025	2021-2026
Indonesia Yang Mandiri, Maju Adil dan Makmur	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Sulawesi Utara Yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman, dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai barometer pembangunan ekonomi perdesaan berwawawasan lingkungan di Indonesia Bagian Timur	Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Berbudaya dan Sejahtera melalui Sinergitas Pembangunan Pedesaan

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:



Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi P-RPJMD dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Misi P-RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021 - 2026

MISI RPJPD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MISI RPJMD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
MISI 1: Mewujudkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berkualitas.	MISI 2: Meningkatkan Budaya dan Pariwisata yang Berkearifan Lokal
MISI 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi lokal perdesaan yang berdaya saing tinggi sebagai barometer pembangunan desa	MISI 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan
MISI 3: Mewujudkan kualitas pelayanan publik melalui kapabilitas kelembagaan dan paratur pemerintahan dengan prinsip <i>good governance</i> .	MISI 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
MISI 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur.	MISI 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan
MISI 5: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Bolaang Mongondow Timur sebagai kabupaten Hijau.	MISI 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan

Keselarasan hubungan antara misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan misi P-RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:



Tabel 5. 3

**Keselarasn Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan Misi P-RPJMD
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021 - 2026**

MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA	MISI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
MISI 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	MISI 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan
MISI 2: Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa	MISI 2: Meningkatkan Budaya dan Pariwisata yang Berkearifan Lokal
MISI 3: Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektifitas	MISI 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan
MISI 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan	MISI 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan
MISI 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dukung oleh Sinergitas Antar Daerah	MISI 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistic. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis bagi perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator P-RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam penjelasan tabel 5.4.



Tabel 5.4
Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Misi
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026

MISI 1 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Baik	LPPD (skor)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan SDM	SAKIP
			Reformasi Birokrasi
			Opini BPK
			Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Indeks Inovasi Daerah	
		Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Persentase Deteksi Dini Konflik Sara Yang Diselesaikan

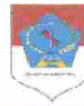
MISI 2 : MENINGKATKAN BUDAYA DAN PARIWISATA YANG BERKEARIFAN LOKAL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan pengembangan kebudayaan dan daya tarik destinasi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas kunjungan wisata	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
			Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB



MISI 3 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan pelayanan wajib yang menyentuh langsung pada masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
			Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
			Persentase Rumah Layak Huni
			Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
			Indeks Desa Membangun
			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
		Pertumbuhan Ekonomi	
		Indeks Gini Ratio	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	
		Persentase Angka Kemiskinan	
		Pengeluaran Perkapita	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Prevalensi Stunting (EEPGBM dan SSGI)
			Rata - Rata Lama Sekolah
Angka Harapan Hidup			
Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	Harapan Lama Sekolah		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			



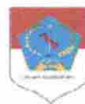
Tabel 5.5
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Berbudaya dan Sejahtera melalui Sinergitas Pembangunan Pedesaan

MISI	NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TAHUN					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Baik	LPPD (skor)	2.46	2.46	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan SDM	SAKIP	B	B	B	B	B	B	B
			Reformasi Birokrasi	C	C	B	B	BB	BB	BB
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 3+	Level 3+	Level 3+	Level 3+
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.04	2.04	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8
	Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif		
1.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Persentase Deteksi Dini Konflik SARA Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



MISI	NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TAHUN					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 2. MENINGKATKAN BUDAYA DAN PARIWISATA YANG BERKEARIFAN LOKAL	2	Meningkatkan pengembangan Kebudayaan dan Daya Tarik Destinasi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	39,21 Juta	39,21 Juta	41,77 Juta	43,62 Juta	45,48 Juta	47,34 Juta	47,34 Juta
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	3.532.941,18 Juta	3.532.941 ,18 Juta	3.808.652, 21 Juta	4.084.363, 24 Juta	4.360.074, 27 Juta	4.635.785, 30 Juta	4.635.785,30 Juta
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	2.039.190,28 Juta	2.039.190 ,28 Juta	2.148.251 ,07 Juta	2.257.311 ,86 Juta	2.366.372 ,65 Juta	2.475.433 ,44 Juta	2.475.433,4 4 Juta
	2.1	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas kunjungan wisata	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	0.32%	0.32%	0.70%	1.20%	1.70%	2.30%	2.30%
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	9.13%	9.13%	8.00%	8.10%	8.20%	8.30%	8.3%
			Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	33.62%	33.62%	34.62%	36.22%	37.82%	39.42%	39.42%
	MISI 3. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	3	Meningkatkan Pelayanan Wajib yang menyentuh langsung pada masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67.21%	67.21%	66,80	71.00	71.15	71.35
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik				50.06%	50.06%	50.35%	52.75%	55.13%	57.31%	57.31%
3.1		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum	74.63%	74.63%	73.10%	73.11%	73.12%	73.20%	73.20%
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	61.15%	61.15%	60.16%	60.46%	60.71%	60.91%	60.91%
			Persentase Rumah Layak Huni	85.53%	85.53%	85.86%	86.42%	87.13%	87.83%	87.83%
			Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
			Indeks Desa Membangun	49,38	49,38	56,79	72,84	79,01	90,12	90,12



MISI	NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TAHUN					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
	3.2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	5,18%	5,18%	5,2-5,5%	5,7-5,9%	6,0-6,4%	6,6-7,1%	6,6-7,1%
			Indeks Gini Ratio	0,37	0,37	0,37	0,35 %	0,31	0,34	0,34
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,1	6,1	6%	6%	6%	6%	6%
			Persentase Angka Kemiskinan	5,8	5,8	5,65%	5,3%	5,21-5,02%	4,9%	4,9%
			Pengeluaran Perkapita	9.390 Ribu Rupiah	9.390 Ribu Rupiah	9.741 Ribu Rupiah	10.019 Ribu Rupiah	10.297 Ribu Rupiah	10.575 Ribu Rupiah	10.575 Ribu Rupiah
	3.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,55	78,55	68,29	68,7	69,11	69,52	69,52
	3.4	Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Prevelensi Stunting (EPPGBM)	6,99%	6,99%	6%	5%	5%	5%	5%
			Prevelensi Stunting (SSGI)	30%	30%	20%	14%	13,5%	13,5%	13,5%
			Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,83 Tahun	7,83 Tahun	8,23 Tahun	8,43 Tahun	8,63 Tahun	8,83 Tahun	8,83 Tahun
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,59	11,59	11,63	11,65	11,67	11,69	11,69
			Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,89	68,89	69,89	70,00	70,00	70,00	70,00
	3.5	Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,9	90,9	90,95%	91%	91,40%	91,50%	91,50%
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,06	74,00	76,00	78,00	78,00	78,00	78,00



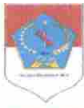
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur periode Tahun 2021–2026 diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur agar dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* Pembangunan Daerah. Sangat penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategi” dalam menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 telah ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan program strategis nasional. Hal ini mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk mempedomani strategi dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Nasional.



Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia** (Pembangunan SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta *global*). Terdapat 6 (enam) strategi untuk meningkatkan layanan dasar dan perlindungan sosial, 4 (empat) strategi untuk meningkatkan produktivitas dan 4 (empat) strategi untuk membangun karakter.
2. **Pembangunan Infrastruktur** (Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat). Terdapat 6 (enam) strategi meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, 4 (empat) strategi berhubungan dengan infrastruktur ekonomi, 5 (lima) strategi pengembangan infrastruktur perkotaan, 3 (tiga) strategi pembangunan energi dan ketenagalistrikan dan 3 (tiga) strategi pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi *digital*.
3. **Penyederhanaan Regulasi** (Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan esalonisasi). Terdapat strategi *Omnibus Law* melalui analisis dampak dan analisis biaya dan manfaat.
4. **Penyederhanaan Birokrasi** (Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan esalonisasi). Terdapat 3 (tiga) strategi melalui penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan *e-government* dan reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanaan dan kepelabuhan.
5. **Transformasi Ekonomi** (Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa moderen yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Terdapat 3 (tiga) strategi berhubungan dengan industrialisasi, pengembangan



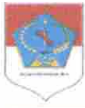
destinasi unggulan dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Sudah ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan sebagai berikut:

✓ **Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi**

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan strategi: (1) mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (2) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (3) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (4) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; serta (5) mengembangkan industri pendukung EBT;
- Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (4) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (5) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (6) mengembangkan waduk multiguna;
- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional;
- Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan



yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standarnisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan *database* kelautan dan perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water);

✓ **Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi**

- Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial;
- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor ril, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi,



termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal;

- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (7) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi;
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan sebagai berikut:

Strategi pembangunan wilayah Sulawesi akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan



pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan Tahun 2019, selama maksimal 3 Tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif;

- Penguatan pusat - pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan wilayah Sulawesi yaitu kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KEK dan KI; dan (g) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; dan (i) penguatan keterkaitan desa - kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
- Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan



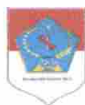
- penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah metropolitan, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan kepulauan;
- Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Sulawesi Tengah dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;
 - Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing sebagai berikut:

- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, melalui: (a) Percepatan cakupan administrasi kependudukan; (b) Integrasi sistem administrasi



- kependudukan; (c) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, melalui: (a) Penguatan pelaksanaan jaminan social; (b) Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran; (c) Perlindungan sosial adaptif; (d) Peningkatan kesejahteraan sosial, dan (e) Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu.
 - Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui: (a) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi; (b) Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; (c) Peningkatan pengendalian penyakit; (d) Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; (e) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - a) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; b) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan; c) Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan; d) Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan; e) Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
 - Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui: (a) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (b) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan disemua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (c) Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (d) Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, dan (e) Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan.
 - Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: (a) Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui

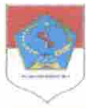


penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; (b) Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (c) Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, dan (d) Peningkatan kualitas pemuda.

- Mengentaskan kemiskinan, melalui: (a) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; (b) Keperantaraan usaha dan dampak social; (c) Reforma agraria, dan (d) Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui: (a) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; (b) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas; (c) Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi; (d) Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional; (e) Penguatan pendamping pembangunan, dan (f) Pengelolaan manajemen talenta nasional.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, melalui: (a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; (b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsive; (c) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran; (d) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental; (e) Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, dan (f) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui: (a) Revitalisasi dan



aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antar warga; (b) Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; (c) Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; (d) Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia, dan (e) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

- Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, melalui: (a) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; (b) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; (c) Penyelarasan relasi agama dan budaya; (d) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan (e) Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
- Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, melalui: (a) Peningkatan budaya literasi; (b) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; (c) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta, dan (d) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai berikut:

✓ **Infrastruktur Pelayanan Dasar**

- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*);
-



- Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku;
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kebijakan keselamatan transportasi difokuskan pada keselamatan lalu lintas jalan mengingat tingginya jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan melalui pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas;
- Ketahanan kebencanaan infrastruktur arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.
- Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

✓ **Infrastruktur Ekonomi**

- Konektivitas Jalan, peningkatan kualitas jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan;
- Konektivitas Kereta Api. Pembangunan konektivitas kereta api diprioritaskan pada pengembangan KA Makassar - Parepare dan KA kecepatan tinggi Pulau Jawa;
- Konektivitas Laut Pembangunan konektivitas transportasi laut untuk mendukung kinerja logistik nasional dilaksanakan melalui standarisasi kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan pada sejumlah pelabuhan utama,



antara lain meliputi tingkat kedalaman pelabuhan, panjang dermaga, dan kinerja bongkar muat;

- Konektivitas Udara Pembangunan transportasi udara difokuskan pada peningkatan bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas daerah 3T;
- Konektivitas Darat Pembangunan transportasi darat diprioritaskan untuk mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan (skema KPBU-AP), pengembangan fasilitas dan perlengkapan jalan, serta pembangunan terminal antar negara untuk mendukung kemudahan arus penumpang dan barang di wilayah perbatasan negara, pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, pembangunan kapal penyeberangan untuk mendukung daerah 3T, dan penyediaan subsidi perintis untuk angkutan penyeberangan, sungai, danau dan bus. Selain itu, dalam rangka mendukung keterpaduan layanan transportasi antar moda akan dilaksanakan penyediaan angkutan bus yang terhubung dengan simpulsimpul transportasi serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

✓ **Infrastruktur Perkotaan**

- Transportasi Perkotaan. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
- Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan;
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan;
- Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau diperkotaan.

✓ **Energi dan Ketenagalistrikan**

Lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, adalah:

- Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan;
- Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik;
- Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan

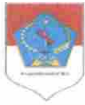


tenaga listrik;

- Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

✓ **Transformasi Digital**

- Penuntasan Infrastruktur TIK;
- Penuntasan Infrastruktur TIK;
- Pemanfaatan Infrastruktur TIK;
- Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebagai berikut :

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari :

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Strateginya melalui (a) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (b) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (c) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan (d) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; Strateginya melalui (a) Penanggulangan Bencana, dan (b) Peningkatan Ketahanan Iklim.
- Pembangunan Rendah Karbon, Strateginya melalui (a) Pembangunan Energi Berkelanjutan; (b) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; (c) Pengelolaan Limbah; (d) Pengembangan Industri Hijau dan (e) rendah karbon Pesisir dan laut.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai berikut:

- Konsolidasi demokrasi, melalui (a) penguatan kapasitas lembaga demokrasi; (b) Penguatan kesetaraan dan kebebasan dan (c) Peningkatan kualitas komunikasi publik.
- Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri melalui (a) Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri; (b) Memperkuat kerja sama pembangunan internasional; (c) Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional, dan (d) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global.
- Penegakan Hukum Nasional, melalui Penataan Regulasi, Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata, Penguatan sistem anti korupsi, dan Peningkatan akses terhadap keadilan;
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- Menjaga stabilitas keamanan nasional.

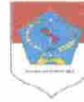


6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor - faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Adapun rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pada tabel 6.1 berikut ini:



Tabel 6. 1
MISI 1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

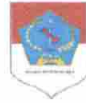
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan SDM	Perbaikan system total quality management	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penempatan PNS berkualitas
	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Meningkatkatnya Keamanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi	Mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TT-PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Tabel 6. 2
MISI II. MENINGKATKAN BUDAYA DAN PARIWISATA YANG BERKEARIFAN LOKAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pengembangan Kebudayaan dan Daya Tarik Destinasi	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas kunjungan wisata	Meningkatkan Lama Kunjungan dan PAD sektor pariwisata	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor kepariwisataan

Tabel 6. 3
MISI III. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

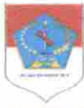
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Wajib yang menyentuh langsung pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi serta Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Memberikan edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang Kualitas Lingkungan
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk perbaikan IPM	Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang sesuai dengan SPM
	Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta acuan bagi para *stakeholder* terkait dalam partisipasi aktif pembangunan.

Tabel 6. 4
Tema Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

TEMA PEMBANGUNAN				
Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi guna Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Budaya dan Pariwisata serta keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar untuk menuju pada Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemantapan Penguatan Sosial Ekonomi Lokal Mendukung Perwujudan Masyarakat Sejahtera yang Berwawasan Lingkungan	Pemantapan Kemandirian Sosial, Politik, Budaya dan Ekonomi menuju Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.



6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) program unggulan, yaitu:

1. Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
3. Pemenuhan akses cakupan layanan air minum dan sanitasi layak.
4. Peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
5. Pembangunan budaya dan pariwisata melalui pengembangan agrowisata, perikanan dan penguatan UMKM serta koperasi terutama di perdesaan.



Tabel 6. 5
Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Visi: Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pemantapan Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Sosial Dan Kemasyarakatan, Guna Menuju Bolaang Mongondow Timur Yang Cerdas, Sehat, Kreatif, Berwawasan Lingkungan, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Pedesaan*

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung	
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		Target
															8,085,962.115	
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik																
Tujuan :																
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Baik																
Sasaran 1 :																
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan SDM																
Indikator: - SAKIP - Reformasi Birokrasi - Opini BPK - Nilai Maturitas Sistem - Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Indeks Inovasi Daerah																
Program :																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	87,66	87,66	4.866.212.115	80	4.866.212.115	80	4.899.228.880	80	4.899.228.880	85	5.256.046.733	85	24.786.928.723	Inspektorat	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Maturitas	Level 3	Level 3	2.070.000.000	Level 3	2.070.000.000	Level 3	2.198.702.477	Level 3	2.250.000.000	Level 3	2.250.000.000	Level 3	10.838.702.477		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistansi	Persentase capaian pelaksanaan PKPT	100%	100%	1.149.750.000	100%	1.149.750.000	100%	1.149.750.000	100%	1.349.117.302	100%	1.429.750.000	100%	6.228.117.302		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat	77,68	77,68	27.384.755.906	80	25.647.315.296	80	26.571.467.614	80	26.960.694.286	85	27.394.882.629	85	106.574.359.825	Sekretariat Daerah	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	76%	76%	3.338.132.580	90%	4.038.132.580	90%	4.938.132.580	90%	5.338.132.580	90%	5.988.132.580	90%	20.302.530.320		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sesuai Kebijakan Pemerintah dan Perundang-undangan	98%	98%	2.920.607.390	90%	3.958.048.000	90%	2.806.765.600	90%	3.060.487.300	90%	3.089.225.800	90%	12.914.526.700		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	7415%	7415%	2.522.436.172	80	2.526.579.789	80	2.521.794.151	80	2.523.915.587	85	2.533.117.731	85	10.105.407.258	Dinas Komunikasi	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	-	-	225.000.000	30,00%	25.000.000	40%	25.000.000	50%	25.000.000	60%	25.000.000	60%	100.000.000		
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan sop yang telah ditetapkan	-	-	215.000.000	25,00%	365.000.000	35%	350.000.000	45%	350.000.000	55%	350.000.000	55%	1.415.000.000		
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	84,61%	84,61%	100.000.000	80,00%	125.000.000	85,00%	150.000.000	85,70%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	650.000.000		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	5,50%	5,50%	510.000.000	19,40%	902.000.000	22,20%	875.000.000	25%	875.000.000	27,80%	875.000.000	27,80%	3.527.000.000	
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	38,80%	38,80%	130.000.000	24,14%	130.000.000	27,59%	130.000.000	31,03%	130.000.000	34,48%	130.000.000	34,48%	520.000.000	
	Persentase perangkat daerah yg menggunakan layanan pusat data pemerintah	-	-	55.000.000	24,14%	76.500.000	27,59%	119.000.000	31,03%	75.500.000	34,48%	44.000.000	34,48%	315.000.000	
	Presentase Perangkat Daerah yang memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar	11,10%	11,10%		60,00%		75%		85%		90,00%		100%	-	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	260.000.000	
	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	15%	15%	74.000.000	20%	74.000.000	25%	74.000.000	30%	74.000.000	35%	74.000.000	35%	296.000.000	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	19,44%	19,44%	90.000.000	33,30%	80.000.000	46,70%	80.000.000	60%	80.000.000	73,30%	80.000.000	73,30%	320.000.000	
	Persentase titik yg diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) pemerintah daerah yg ditetapkan	19,44%	19,44%	35.000.000	17,20%	35.000.000	24,10%	35.000.000	25%	35.000.000	25,80%	35.000.000	37,90%	140.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	84,2	84,2	4.568.575.641	80	4.797.301.897	80	4.918.089.732	80	4.918.089.732	85	4.918.089.732	85	19.551.571.093	Badan Perencanaan Pembangunan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Konsistensi Dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	100	767.776.939	100%	971.110.274	100%	874.443.610	100%	877.776.938	100%	881.720.576	100%	3.605.051.398	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian penelitian dan pengembangan	-	-	39.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Penelitian Dan Pengembangan	100	100	155.003.000	100%	324.911.006								324.911.006	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai waktu	100	100	611.624.672	100%	620.008.000	100%	1.020.818.028	100%	984.587.719	100%	981.254.383	100%	3.606.668.130	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	-	-	-	80	750.000.000	80	1.500.000.000	80	1.500.000.000	85	1.500.000.000	85%	4.500.000.000	Badan Riset dan Inovasi daerah
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian penelitian dan pengembangan	-	-	-	-	-	-	2.412.803.105	-	2.712.803.105	100	3.312.803.105	100%	8.438.409.315	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	78,75	78,75	24.528.153.832	80	23.755.492.847	80	25.347.273.847	80	26.044.273.847	85	27.067.273.847	85	103.627.095.388	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Anggaran Sisa terhadap belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,13%	8,13%	112.479.908.467	3,0%	112.145.704.929	3,0%	112.965.704.929	3,0%	114.229.704.929	3,0%	114.215.704.929	3,0%	453.556.819.716	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Managemen Aset	YA	YA	936.866.320	YA	836.866.320	YA	936.866.320	YA	1.036.866.320	YA	936.866.320	YA	3.747.465.280	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RASIO PAD	2,35%	2,35%	1.799.421.530	2,35%	1.670.010.857	2,35%	1.658.393.259	2,35%	1.848.725.999	2,35%	1.782.483.608	80%	6.959.613.723	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai akip hasil penilaian inspektorat	75,86	75,86	5.020.949.526	80	5.020.949.526	80	5.020.949.526	80	5.334.023.215	85	5.534.023.215	85	20.909.945.482	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	NA	1	954.913.760	251	954.913.760	272	954.913.760	294	954.913.760	315	994.913.760	315	3.859.655.040	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-Rata Lama Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	4 Tahun	1	285.610.500	26,54%	285.610.500	30,56%	285.610.500	34,57%	285.610.500	38,59%	350.117.298	38,59%	1.206.948.798	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	78,61	78,61	11.684.492.298	80	11.684.492.298	80	11.887.911.127	80	12.200.000.000	85	13.200.000.000	85	48.972.403.425	Sekretariat DPRD
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	9.386.454.165	Ada	9.386.454.165	Ada	9.604.454.265	Ada	9.945.564.733	Ada	10.085.502.936	Ada	39.021.976.099	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP hasil evaluasi Inspektorat	NA	NA	11.993.738.434	80	12.000.781.434	80	11.540.939.354	80	11.909.467.156	85	12.438.883.092	85	47.890.071.036	7 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan yang dilaksanakan	80%	80%	72.000	80%	52.000	80%	181.364.000	80%	184.729.562	80%	188.998.142	80%	555.143.705	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Program dan Administrasi	100%	100%	331.579.000	75%	324.621.000	75%	253.499.225	75%	179.697.092	75%	178.221.975	75%	936.039.292	
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentasi Aduan Kamtibmas yang Diselesaikan	100%	100%	41.000	50%	27.000	50%	185.877.440	50%	191.290.432	50%	194.104.181	50%	571.299.053	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan	80%	80%	56.000	50%	41.000	50%	187.899.763	50%	186.890.362	50%	186.486.158	50%	561.317.283	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah perdes yg ditetapkan	100%	100%	127.000	50%	91.000	50%	178.917.075	50%	190.891.556	50%	197.338.386	50%	567.238.016	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung	
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Sasaran 2 :																
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial																
Indikator:																
- Persentase Deteksi Dini Konflik SARA yang Diselesaikan																
Program :																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	73,01	73,01	2.164.758.532	80	2.111.236.190	80	2.113.341.628	80	2.139.055.420	85	2.291.196.190	85	8.654.829.428		Badan Kesatuan Bangsa dan
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	99%	99%	329.758.842	90%	329.758.842	90%	330.758.843	90%	335.758.843	90%	342.858.843	90%	1.339.135.370		
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Persentase capaian Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik	99%	99%	200.000.000	90%	179.759.024	90%	229.758.843	90%	211.758.843	90%	207.349.402	90%	828.626.111		
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Capaian Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80%	80%	59.879.421	90%	59.879.421	90%	60.879.421	90%	88.879.421	90%	95.838.303	90%	305.476.567		
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase capaian Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	99%	99%	100.000.000	90%	144.879.602	90%	154.879.421	90%	194.879.421	90%	198.879.421	90%	693.517.866		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	96%	96%	200.875.127	90%	229.758.843	90%	226.759.205	90%	240.758.843	90%	240.258.843	90%	937.535.733		
Misi 2 : Meningkatkan pengembangan kebudayaan dan daya tarik destinasi																
Tujuan :																
Meningkatkan pengembangan Kebudayaan dan Daya Tarik Destinasi																
Sasaran 1 :																
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas kunjungan wisata																
Indikator:																
- Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB																
- Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB																
- Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB																
Program :																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	79,95	79,95	3.120.537.991	80	3.420.538.001	81	3.520.538.001	82	3.520.538.001	83	3.620.538.000	83	14.082.152.003		Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan	0%	1%	1.290.153.230	0%	1.390.153.230	0,00%	1.490.153.230	0,00%	1.490.153.230	0,00%	1.590.153.230	0,00%	5.960.612.920		
	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang	22,01%	0,36%		25%		27,00%		31,00%		34,00%		34,00%			
	Tingkat Hunian akomodasi	100%	26%		100%		100%		100%		100%		100%			
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Promosi Event Daerah yang terlaksana di dalam negeri	94,11%	70,00%	1.037.308.800	100%	1.137.308.800	100%	1.237.308.800	100%	1.237.308.800	100%	1.337.308.800	100%	4.949.235.200		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak	Persentase Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha	0%	100%	170.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	460.000.000		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataaan	74,21%	42,00%	722.076.049	100%	836.083.646	100%	884.787.830	100%	1.052.223.039	100%	1.120.105.954	100%	3.893.200.469		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	77,05	77,05	8.277.193.764	80	9.278.433.454	80	9.443.915.443	80	10.648.039.236	85	11.221.147.378	85	40.591.535.511	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Sarana Pertanian yang diberikan	100%	100%	980.000.000	93%	1.855.000.000	93%	1.990.000.184	94%	1.602.000.000	95%	1.789.000.000	95%	7.236.000.184	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	93%	93%	2.035.000.000	89%	2.420.000.000	89%	2.875.000.000	90%	1.795.000.000	91%	1.765.000.000	91%	8.855.000.000	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	kejadian/kasus penyakit hewan menular	45%	45%	129.000.000	45%	211.000.000	45%	183.000.000	46%	312.000.000	47%	323.000.000	47%	1.029.000.000	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentasi Fasilitas Penanggulangan Bencana	65%	65%	30.000.000	65%	30.000.000	65%	30.000.000	66%	70.000.000	67%	70.000.000	67%	200.000.000	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100%	100%	55.000.000	100%	25.000.000	100%	75.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	220.000.000	
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani	84 Kelompok	84 Kelompok	105.000.000	84 Kelompok	230.000.000	89 Kelompok	155.000.000	94 Kelompok	300.000.000	96 Kelompok	300.000.000	96 Kelompok	985.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	80,85	80,85	2.858.889.061	80	5.232.022.042	80	2.842.868.683	80	2.699.421.036	85	2.774.704.437	85	13.549.016.198	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Gudang yang Mempunyai TDG			11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	11.000	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	14,28%	14,28%	1.750.000.000	71%	1.280.000.000	86%	1.870.000.000	86%	2.330.000.000	100%	2.450.000.000	100%	7.930.000.000	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Barang Beredar Yang di Awasi Yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	100%	100%	325.005.000	25%	345.005.000	30%	370.005.000	40%	430.005.000	45%	430.005.000	45%	1.575.020.000	
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Pelatihan/ Fasilitas Peningkatan Kapasitas Terkait Ekspor	0	0	275.004.000	1,40%	325.004.000	2,10%	400.004.000	2,80%	550.004.000	3,50%	600.004.000	3,50%	1.875.016.000	
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0	154.981.000	8%	154.981.000	12%	154.981.000	16%	214.981.000	20%	234.981.000	20%	759.924.000	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	0	0	150.000.000	7%	170.000.000	13%	190.000.000	16%	210.000.000	21%	240.000.000	21%	810.000.000	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	79,44	79,44	1.950.003.000	20%	1.250.003.000	25%	2.700.003.000	15%	2.400.003.000	10%	2.450.003.000	10%	8.800.012.000	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	0	20.001.000	60%	20.001.000	70%	20.001.000	80%	20.001.000	90%	20.001.000	90%	80.004.000	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota	0	0	10.002.000	0%	10.002.000	0%	10.002.000	0%	15.002.000	0%	15.002.000	0%	50.008.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan tjin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	5.001.000	33,33%	5.001.000	50%	5.001.000	66,67%	5.001.000	83,33%	5.001.000	83,33%	20.004.000	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di lakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	26,92%	26,92%	20.001.000	10%	20.001.000	12%	20.001.000	15%	20.001.000	20%	20.001.000	20%	80.004.000	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang di nilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	0	0	80.000.000	6,86	80.000.000	7,84%	80.000.000	8,82%	120.000.000	9,80%	120.000.000	9,80%	400.000.000	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	60.000.000	6,86	60.000.000	8,82%	60.000.000	11,76%	60.000.000	14,71%	60.000.000	14,71%	240.000.000	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	50.000.000	10%	50.000.000	15%	50.000.000	20%	50.000.000	24%	50.000.000	24%	200.000.000	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	89,94%	89,94%	65.003.000	18,52%	75.003.000	21,16%	85.003.000	23,81%	100.003.000	26,46%	110.003.000	26,46%	370.012.000	
Program Pengembangan UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,70%	10,70%	958.905.298	13,32%	529.052.953	13,40%	940.339.052	13,64%	871.575.396	13,92%	834.061.353	13,92%	3.175.028.754	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	77,91	77,91	3.402.987.543	80	3.408.000.000	80	3.408.000.000	80	3.658.000.000	85	3.658.591.799	85	14.132.591.799	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan	12.830,63 ton	12.830,63 ton	1.850.000.000	11.375,98 ton	2.310.810.754	12.762,31 ton	2.369.586.630	13.498,56 ton	1.840.008.000	15.827,69 ton	2.135.436.160	15.827,69 ton	8.655.841.544	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan	715,63 ton	715,63 ton	624.990.000	685,75 ton	581.975.543	824,39 ton	581.979.543	916,53 ton	867.436.160	1012,32 ton	572.004.000	1012,32 ton	2.603.395.246	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap total luas perairan teritorial	0	0	2.000											
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan	0%	0%	8.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	0%	660.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung		
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target		(Rp)	
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan																
Tujuan :																
Meningkatkan Pelayanan Wajib yang menyentuh langsung pada masyarakat																
Sasaran 1 :																
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur																
Indikator:																
- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik																
- Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum																
- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi																
- Persentase Rumah Layak Huni																
- Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana																
- Indeks Desa Membangun																
Program :																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	79	79	20.852.515.000	80	7.521.515.000	80	7.872.515.000	80	7.512.515.000	85	7.376.514.000	85	30.283.059.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	88,99%	88,99%	3.686.377.000	90,00%	3.614.072.000	90,75%	4.509.967.000	91,50%	4.422.662.000	92,25%	3.396.377.000	92%	15.943.078.000		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum	74,63%	74,63%	1.700.016.000	73,10%	3.023.516.000	73,11%	3.711.216.000	73,12%	3.500.716.000	73,20%	3.300.616.000	73%	13.536.064.000		
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0%	0%	400.004.000	0,00%	-	50,00%	410.004.000	75,00%	410.004.000	100%	410.004.000	100%	1.230.012.000		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah tinggal ber sanitasi	61,15%	61,15%	2.900.014.000	60,16%	2.900.014.000	60,46%	2.700.014.000	60,71%	2.900.014.000	60,91%	2.700.014.000	61%	11.200.056.000		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	8,38%	8,38%	2.650.012.000	9,24%	2.400.012.000	9,48,%	2.400.012.000	9,72%	2.400.012.000	9,96,%	2.400.012.000	9,96,%	9.600.048.000		
Program Pengembangan Permukiman	Presentase penetapan perda kawasan strategis kabupaten	0%	0%	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0%	0%	13.000	-	-	25%	200.000.000	75%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	600.000.000		
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0%	0%	3.000	0,193	500.003.000	0,5899	1.455.007.000	0,719	5.045.005.000	1	5.150.005.000	100%	12.150.020.000		
Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	50,06%	50,06%	15.586.931.104	50,35%	27.721.561.272	52,75%	31.303.471.792	55,13%	27.981.355.568	57,31%	30.889.915.084	57%	117.896.303.716		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0%	0%	55.024.000	0%	-	19%	3.320.034.000	31%	3.650.034.000	49,63%	3.975.034.000	49,63%	10.945.102.000		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	99,76%	99,76%	1.050.005.000	99,76%	1.000.005.000	99,76%	950.005.000	100%	950.005.000	100,00%	950.005.000	100%	3.850.020.000		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemukiman yang tertata	0%	0%	960.004.000	31%	1.260.004.000								1.260.004.000		
Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	85,53	85,53	2.285.004.000	33%	1.580.005.006								1.580.005.006		
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio permukiman layak huni			1.200.001.000	33%	1.800.001.000								1.800.001.000		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase lingkungan permukiman kumuh	0,79%	0,79%	2.200.002.000	15,95%	2.710.002.000								2.710.002.000		
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan	Persentase koordinasi peningkatan pelayanan sertifikasi kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan	0%	0%	-	0%	-								-		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	-	-	-	80	662.781.000	80	1.325.562.000	80	1.369.953.421	85	1.378.000.562	85	4.073.515.983	Dinas Perumahan, Kawasan
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	-	-	-	-	-	80%	485.395.343	85%	992.101.000	90%	1.015.948.106	90%	2.493.444.449	
Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	-	-	-	97%	815.005.000	95%	924.189.358	90%	921.222.010	90%	2.660.416.368	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio permukiman layak huni	-	-	-	-	-	23%	854.621.400	25%	872.451.000	27%	1.276.945.806	27%	3.004.018.206	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	-	-	-	-	-	50%	1.505.478.921	55%	1.878.030.878	60%	1.828.133.914	60%	5.211.643.713	
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah pengebang yang teregistrasi	-	-	-	-	-	100%	214.501.325	100%	216.257.800	100%	282.400.054	100%	713.159.179	
Program Pengelolaan izin Lokasi	Penyelesaian izin lokasi	-	-	-	-	-	40%	-	50%	-	75%	-	75%	-	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase luas lahan bersertifikat	-	-	-	-	-	50%	-	75%	-	80%	-	80%	-	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	-	-	-	-	50%	111.054.712	75%	144.469.351	80%	130.469.351	80%	385.993.414	
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	-	-	-	-	50%	112.031.674	75%	116.031.600	80%	112.031.600	80%	340.094.874	
Program Penetapan Tanah Ulayat	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	-	-	-	-	50%	-	75%	-	80%	-	80%	-	
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	-	-	-	-	50%	121.450.100	75%	120.450.100	80%	103.450.100	80%	345.350.300	
Program Pengelolaan izin Membuka Tanah	Penyelesaian izin lokasi	-	-	-	-	-	50%	256.784.010	75%	210.487.100	80%	190.487.111	80%	657.758.221	
Program Penatagunaan Tanah	Penyelesaian izin lokasi	-	-	-	-	-	40%	128.900.110	50%	129.014.070	75%	130.214.002	75%	388.128.182	
Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	-	-	-	-	-	16,9%	156.412.300	17,1%	177.893.641	17,3%	162.345.014	17,3%	496.650.955	
Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan	Persentase luas lahan bersertifikat	-	-	-	-	-	40%	-	50%	-	75%	-	75%	-	
Program Pengembangan Dan Pembinaan Sdm Dan Kelembagaan Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi	-	-	-	-	-	40%	-	50%	-	75%	-	75%	-	
Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau	Penyelesaian izin lokasi	-	-	-	-	-	40%	-	50%	-	75%	-	75%	-	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi	-	-	-	-	-	40%	-	50%	-	75%	-	75%	-	
Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	-	-	-	-	40%	-	50%	-	75%	-	75%	-	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pemangung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	77,45	77,45	2.868.367.396	75	2.808.367.396	80	2.938.367.644	82	2.914.367.278	85	2.914.367.024	11.575.469.342	Dinas Pemberdayaan	
Program Penataan Desa	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	64%	64%	30.000.000	61,70%	30.000.000	74,70%	30.000.000	86,40%	35.000.000	100%	35.000.000	100%		130.000.000
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa dengan sesama desa dan dengan Pihak Ketiga	120%	120%	110.000.000	19,70%	110.000.000	28,30%	90.000.000	43,20%	105.000.000	58,00%	125.000.000	58,00%		430.000.000
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	0%	314.340.000	18,50%	344.440.000	17,20%	315.149.000	14,80%	425.149.000	12,30%	500.149.000	12,30%		1.584.887.000
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi	19,70%	19,70%	193.055.000	18,50%	222.955.000	19,70%	212.561.000	22,20%	215.550.000	30,80%	310.753.000	30,80%		961.819.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	78,45	78,45	3.013.585.510	77	3.052.271.560	78	3.052.271.560	79	3.102.271.560	80	3.106.581.004	80	12.313.395.684	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	100%	100%	-	40%	212.172.501	40%	223.258.356	40%	226.766.942	40%	223.258.356	40%	885.456.155	
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase program pengelolaan pelayaran	90%	90%	-	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	160.000.000	
Program pengelolaan penerbangan	Persentase pengelolaan penerbangan	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program pengelolaan perkotaan	Persentase pengelolaan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 2 :															
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat															
Indikator:															
- Pertumbuhan Ekonomi															
- Indeks Gini Ratio															
- Tingkat Pengangguran Terbuka															
- Persentase Angka Kemiskinan															
- Pengeluaran Perkapita															
Program :															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	80,1	80,1	4.012.366.385	80	3.970.122.000	80	3.938.169.333	85	3.992.212.352	85	4.172.443.773	85	16.072.947.458	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	100%	100%	475.004.000	100%	546.448.385	100%	674.004.000	100%	824.004.000	100%	824.004.000	100%	2.868.460.385	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	487.518.000	100%	582.519.000	100%	570.018.000	100%	590.018.000	100%	619.517.000	100%	2.362.072.000	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	0%	0%	1.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Kegiatan kepahlawanan yang terlaksanakan	0%	0%	50.002.000	100%	50.002.000	100%	50.002.000	100%	50.002.000	100%	50.002.000	100%	200.008.000	
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	100%	100%	355.203.000	100%	355.203.000	100%	382.703.000	100%	355.203.000	100%	355.203.000	100%	1.448.312.000	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	960.003.000	2%	835.803.000	2%	852.003.000	2%	852.003.000	2%	852.003.000	2%	3.391.812.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	8060%	8060%	3.079.774.351	80	3.079.774.351	80	3.079.774.351	80	3.129.774.351	85	3.193.910.413	100	12.483.233.466	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	0%	0%	250.000.000	12,5 %	250.000.000	18,75 %	300.000.000	25%	350.000.000	31,25%	450.000.000	31,25%	1.350.000.000	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9,11%	9,11%	64.873.900	17%	64.873.900	20%	64.873.900	22%	64.873.900	25,20%	64.873.900	25,20%	259.495.600	
Program Hubungan Industri	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB/LKS, BIPARTIT, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0%	0%	45.000.000	86%	45.000.000	86,65 %	45.000.000	87,05 %	45.000.000	88,35%	45.000.000	88,35%	180.000.000	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0%	0%	251.727.360	17,54 %	251.727.360	19,30 %	275.554.872	21,05 %	289.987.516	25%	325.554.875	25%	1.142.824.623	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	78,75	78,75	3.066.985.710	80	3.043.485.710	80	3.067.735.464	80	3.121.972.583	85	3.303.883.168	85	12.537.076.925	Dinas Kependudukan dan Catatan
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	81,05%	81,05%	75.001.000	20%	81.001.000	20%	92.001.000	20%	98.001.000	20%	113.001.000	20%	384.004.000	
Program Pencatatan Sipil	Rasio Bayi Berakte Lahir	0,9088	90,88%	51.001.000	98%	61.001.000	98%	73.001.000	98%	70.001.000	98%	82.001.000	98%	286.004.000	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan data Base Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	164.500.000	Ada	172.000.000	Ada	191.000.000	Ada	187.000.000	Ada	207.000.000	Ada	757.000.000	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	5.000.000	Sudah	5.000.000	Sudah	6.000.000	Sudah	57.000.000	Sudah	10.000.000	Sudah	78.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	79,92	79,92	3.458.220.030	75	3.458.220.030	80	3.443.884.430	80	3.671.664.251	85	3.843.386.455	85	14.417.155.166	Dinas Penanaman
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	0%	0%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	300.000.000	20%	200.000.000	26,67%	250.000.000	26,67%	950.000.000	
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Beskala Nasional PMA dan PMDN	7 Investor	7 investor	200.000.000	12 Investor	200.000.000	13 Investor	200.000.000	14 Investor	200.000.000	14 Investor	200.000.000	14 Investor	800.000.000	
Program Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pernerbitan Perizinan dan Non Perizinan	96%	96%	200.000.000	95%	200.000.000	95%	200.000.000	96%	200.000.000	97%	200.000.000	97%	800.000.000	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai sakip hasil pemeriksaan inspektorat dengan nilai B	76,47	76,47	2.092.326.952	70	2.092.326.952	75	2.092.326.952	80	2.277.942.678	85	2.449.871.320	85	8.912.467.902	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Presentase ketersediaan Pangan Utama	100%	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	226.500.000	100%	871.500.000	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	93	94,6	774.501.000	94,6	774.501.000	95,5	774.501.000	96	772.001.000	96,5	776.001.000	96,5	3.097.004.000	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	96,3%	9630%	450.000.000	96,3	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	455.000.000	100%	1.805.000.000	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	90%	94%	117.500.000	94%	117.500.000	97%	117.500.000	98%	120.500.000	99%	125.500.000	99%	481.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung	
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Sasaran 3 :																
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																
Indikator:																
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																
Program :																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	78,95	78,95	2.390.280.572	80	2.220.280.572	80	2.306.886.183	80	2.407.874.881	85	2.446.568.060	85	9.381.609.696		Badan Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	100%	1.190.000.000	100%	1.360.000.000	100%	1.345.000.000	100%	1.355.000.000	100%	1.510.000.000	100%	5.570.000.000		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	72,26	72,26	2.120.807.585	80	2.320.807.585	80	2.321.423.737	80	2.383.128.772	85	2.350.620.462	85	9.375.980.556		Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	463.000.000	100%	263.000.000	100%	263.000.000	100%	263.000.000	100%	463.000.000	100%	1.252.000.000		
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	Terpenuhinya Baku Mutu Lingkungan Hidup	Terpenuhi	Terpenuhi	225.000.000	Memenuhi Baku Mutu	225.000.000	Memenuhi Baku Mutu	225.000.000	Memenuhi Baku Mutu	225.000.000	Memenuhi Baku Mutu	225.000.000	Memenuhi Baku Mutu	900.000.000		
Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	NA	3 Kawasan	80.000.000	3 Kawasan	60.000.000	3 Kawasan	60.000.000	3 Kawasan	60.000.000	3 Kawasan	60.000.000	3 Kawasan	240.000.000		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 (LB3) yang dikelola sesuai ketentuan	50%	50%	25.000.000	50%	25.000.000	50%	25.000.000	50%	25.000.000	50%	25.000.000	50%	100.000.000		
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan LH (PPLH)	Persentase Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		1	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000		
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.	na	0,18	12.000.000	18%	12.000.000	18%	12.000.000	43%	12.000.000	54%	12.000.000	54%	48.000.000		
Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase Tingkat Pemahaman masyarakat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	na	0,2	15.000.000	20%	15.000.000	40%	15.000.000	40%	15.000.000	40%	15.000.000	40%	60.000.000		
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat / dunia usaha/ dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	na	0,18	10.000.000	18%	10.000.000	43%	10.000.000	43%		54%	10.000.000	54%	30.000.000		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	40.000.000		
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	25%		320.000.000	25%	340.000.000	25%	385.000.000	43%	435.000.000	54%	435.000.000	54%	1.595.000.000		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	77,4	77,4	1.757.731.080	72	1.757.731.080	73	1.830.444.752	74	1.943.150.943	75	2.139.841.424	75	7.671.168.199	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	100%	100%	1.718.548.920	100%	1.718.548.920	100%	1.718.548.920	100%	1.718.548.920	100%	1.718.548.920	100%	6.874.195.680	
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%	100%	159.403.580	100%	159.403.580	100%	159.403.580	100%	159.403.580	100%	159.403.580	100%	637.614.320	
Sasaran 4 :															
Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat															
Indikator:															
- Prevelensi Stunting (EEPOBM)															
- Prevelensi Stunting (SSGI)															
- Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)															
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)															
- Angka Harapan Hidup (Tahun)															
Program :															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	79,95	79,95	114.023.000.000	80	114.162.500.000	80	104.143.000.000	85	104.838.267.576	85	104.972.455.265	85	428.116.222.841	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.53 Tahun	8.53 Tahun	21.822.547.424	8.23 Tahun	21.822.547.424	8.43 Tahun	21.822.547.424	8.63 Tahun	21.822.547.424	8.93 Tahun	21.822.547.424	8.93 Tahun	87.290.189.696	
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Kurikulum Yang Di Kembangkan	0%	0%	270.000.000	1 dok	270.000.000	1 dok	270.000.000	1 dok	270.000.000	1 dok	270.000.000	5 dok	1.080.000.000	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Uji Kompetensi Dengan Predikat Memenuhi Passing Grade	63 Guru	63 Guru	200.000.000	186 Guru	200.000.000	186 Guru	200.000.000	186 Guru	200.000.000	186 Guru	200.000.000	744 Guru	800.000.000	
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Dikembangkan	50%	50%	1.070.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000	
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Seni Budaya yang di Lestarkan	2 Seni Budaya	2 Seni Budaya	690.000.000	2 Seni Budaya	690.000.000	2 Seni Budaya	690.000.000	2 Seni Budaya	690.000.000	2 Seni Budaya	690.000.000	2 Seni Budaya	2.760.000.000	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Komunitas/sanggar seni yang di Fasilitas	1 Sanggar Seni	1 Sanggar Seni	120.000.000	1 Sanggar Seni	120.000.000	1 Sanggar Seni	120.000.000	2 Sanggar Seni	120.000.000	2 Sanggar Seni	120.000.000	2 Sanggar Seni	480.000.000	
Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal	0	0	120.000.000	1 Sejarah Lokal	120.000.000	1 Sejarah Lokal	120.000.000	1 Sejarah Lokal	120.000.000	1 Sejarah Lokal	120.000.000	1 Sejarah Lokal	480.000.000	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi	2 CB	2 CB	300.000.000	2 CB	180.000.000	2 CB	180.000.000	2 CB	180.000.000	2 CB	180.000.000	2 CB	720.000.000	
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang dikelola dengan baik	0	0	6.000.000	1 Museum	2.079.777.779	1 Museum	2.200.155.556	1 Museum	2.212.193.334	1 Museum	2.833.996.293	1 Museum	9.326.122.962	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	81,98	81,98	28.729.917.541	80	28.792.719.050	80	28.858.999.201	80	28.865.627.216	85	28.886.290.018	85	115.403.635.485	DINAS KESEHATAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Kesehatan)	98,68%	98,68%	41.101.783.200	70%	41.701.783.200	75%	41.701.783.200	75%	41.701.783.200	75%	41.681.783.200	75%	166.787.132.800	
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Obat- obatan dan Pengawasan Makanan dan Minuman yang memenuhi ketentuan Standar	97%	97%	275.060.200	80%	275.060.200	85%	275.060.200	90%	275.060.200	90%	275.060.200	90%	1.100.240.800	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prevalensi Stunting	30%	30%	2.644.572.900	5%	2.644.572.900	4%	2.644.572.900	3%	2.644.572.900	1%	2.644.572.900	1%	10.578.291.600	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga kesehatan Sesuai Standar	0	0	156.832.200	100%	156.832.200	100%	156.832.200	100%	156.832.200	100%	156.832.200	100%	627.328.800	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	76,3	76,3	2.401.215.855	80	2.443.605.828	80	2.705.836.070	80	2.847.377.823	85	2.977.521.664	85	10.974.341.385	DINAS PENGENDALIA
Program Pengendalian Penduduk	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB/ Jumlah semua perangkat daerah x100%	50%	50%	52.701.000	75%	52.000.000	85%	57.000.000	100%	63.000.000	100%	69.000.000	100%	241.000.000	
	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk / Jumlah semua perangkat daerah x100%	50%	50%		75%		85%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	180.000.000	
	Jumlah Sektor	30 Sektor	30 Sektor		30 Sektor		35 Sektor	62.000.000	50 Sektor	67.000.000	50 Sektor	72.000.000	50 Sektor	201.000.000	
	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan	10 Kerjasama	10 Kerjasama		15 Kerjasama		20 Kerjasama	53.000.000	25 Kerjasama	58.000.000	25 Kerjasama	63.000.000	25 Kerjasama	174.000.000	
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2.04 Anak	2.04 Anak	2.855.621.977	2.1 Anak	2.767.377.004	2.1 Anak	1.904.506.419	2.1 Anak	1.899.822.133	2.1 Anak	1.950.381.164	2.1 Anak	8.522.086.720	
	Jumlah anak/ Jumlah keluarga	2.1 Anak	2.1 Anak		2.5 Anak		2.4 Anak	102.000.000	2.3 Anak	102.000.000	2.2 Anak	102.000.000	2 Anak	306.000.000	
	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 / Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama x1000	17.9 Kelahiran	17.9 Kelahiran		13.9 Kelahiran		12.5 Kelahiran	102.000.000	11.2 Kelahiran	102.000.000	10 Kelahiran	102.000.000	10 Kelahiran	306.000.000	
	Jumlah peserta KB aktif/ Jumlah pasangan usia subur x100%	103%	103%		81%		83%	102.000.000	84%	102.000.000	85%	102.000.000	85%	306.000.000	
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani Jumlah pasangan usia subur x100%	14,99%	14,99%		10,50%		10%	102.000.000	9%	102.000.000	8%	102.000.000	8%	306.000.000	
	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP/ P21 Jumlah akseptor KB x100%	25,48%	25,48%		31%		32%	102.000.000	33%	102.000.000	35%	102.000.000	35%	306.000.000	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB Jumlah anggota kelompok BKB x100%	78%	78%	8.444.000	76%	55.000.000	77%	16.500.000	78%	18.500.000	79%	31.000.000	79%	121.000.000	
	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB Jumlah anggota kelompok BKR x100%	78%	78%		76%		77%	15.500.000	78%	17.500.000	79%	31.000.000	79%	64.000.000	
	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB Jumlah anggota kelompok BKL x100%	78%	78%		76%		77%	12.000.000	78%	13.000.000	79%	28.000.000	79%	53.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Jumlah PPKS Jumlah kecamatan x100%	78%	78%	76%		77%	11.000.000	78%	12.000.000	79%	27.000.000	79%	50.000.000		
	Jumlah PIK R/M Jumlah kecamatan x100%	78%	78%	76%		77%	11.000.000	78%	12.000.000	79%	27.000.000	79%	50.000.000		
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Jumlah anggota kelompok UPPKS x100%	50%	50%	76%		77%	11.000.000	78%	11.000.000	79%	26.000.000	79%	48.000.000		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Akip Hasil Hasil Evaluasi Inspektorat	80,22	80,22	2.373.598.852	75	2.373.577.852	75	2.367.712.869	75	2.444.069.495	80	2.540.953.502	80	9.726.313.718	Dinas Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	500 Orang	500 Orang	257.002.000	750 Orang	140.006.000	1000 Orang	122.498.000	1.250 Orang	140.000.000	1.500 Orang	150.002.000	1.500 Orang	552.506.000	
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	1.398 Exp	1.398 Exp		1.500 Buku	75.000.000	2.000 Buku	80.000.000	2.500 Buku	80.000.000	3.000 Buku	80.000.000	3.000 Buku	315.000.000	
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	323 Judul	323 Judul		400 Judul	42.004.000	450 Judul	84.502.000	475 Judul	84.502.000	500 Judul	95.000.000	500 Judul	306.008.000	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang di Akuisisi/ dialih media (digitalisasi) /terdaftar yang ada diwilayahnya	-	-	-	-	-	-	-	7 Naskah	-	7 Naskah	-	7 Naskah	-	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	-	-	45.000.000	11%	25.002.000	11%	35.000.000	11%	35.000.000	11%	40.000.000	11%	135.002.000	
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan	-	-		1	20.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	100.000.000	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Sesuai NSPK	-	-	20.000.000	7	20.011.000	7	25.000.000	7	25.015.000	7	32.004.000	7	102.030.000	
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	-	-	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	62.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	76,99	76,99	3.110.081.475	80	3.110.081.475	80	3.186.803.105	80	3.110.081.475	85	3.110.081.475	85	12.517.047.530	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatkan Organisasi Pemuda yang Aktif, Pemuda yang Berwirausaha dan Pemuda yang Berprestasi	20,39%	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	100%	2.472.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatkan Atlet yang Berprestasi di Tingkat Propinsi,Nasional dan Internasional	6 Atlet	6 Atlet	100.000.000	6 atlet	100.000.000	6 atlet	100.000.000	6 atlet	295.640.155	6 atlet	503.172.163	6 atlet	998.812.318	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan yang Dilaksanakan oleh Kwarda	0 Orang	0 Orang	8.000.000	84 Orang	8.000.000	120 Orang	8.000.000	120 Orang	8.000.000	125 Orang	8.000.000	125 Orang	32.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung	
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
			Capaian	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Sasaran 5 :																
Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender																
Indikator:																
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)																
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)																
Program :																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akip Hasil Evaluasi Inspektorat	75,31	75,31	2.129.043.526	80	2.228.549.626	80	2.239.043.526	80	2.239.043.526	85	2.239.183.806	85	8.945.820.484		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada TOTAL BELANJA APBD	0%	0%	45.000.000	0,5%	45.000.000	1,0%	45.000.000	1,5%	45.000.000	2,0%	45.000.000	0,02	180.000.000		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan	0%	0%	13.051.100	15%	38.051.100	22%	38.051.100	28%	40.335.987	42%	40.424.195	0,42	156.862.382		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pranikah yang mendapatkan rekomendasi dari PUSPAGA	0%	0%	5.000.000	0,75	13.488.701	0,8	16.337.571	0,85	16.337.571	90%	16.337.571	0,9	62.501.414		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Yang Memiliki Forum Anak yang Aktif	23%	23%	33.730.800	10%	83.730.800	10%	83.730.800	10%	83.730.800	10%	83.730.800	0,1	334.923.200		
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani	100%	100%	10.493.900	11 kasus	40.493.900	10 kasus	50.000.000	9 kasus	50.000.000	8 kasus	50.000.000	8 kasus	190.493.900		
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100%	100%	48.567.680	55 kasus	64.061.580	50 kasus	64.061.580	45 kasus	64.061.580	40 kasus	64.061.580	40 kasus	256.246.320		



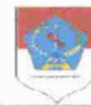
BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berisi program-program prioritas baik untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah, termasuk menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap perangkat daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, program-program prioritas terdiri dari program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk pemenuhan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada bagian ini disajikan program-program prioritas untuk mencapai Visi dan 3 (tiga) Misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026, sebagaimana diuraikan pada Bab V. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2.



Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

NO	URAIAN POS BELANJADAERAH	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A	BELANJA	561.444.461.267	586.446.455.970	594.969.451.717
1	BELANJA OPERASI	486.883.623.336	509.062.870.954	515.582.870.954
1,1	Belanja Pegawai	221.120.942.511	226.648.966.074	228.648.966.074
1,2	Belanja Barang dan Jasa	159.574.476.975	163.563.838.899	165.963.838.899
1,3	Belanja Hibah	350.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000
1,4	Belanja Bantuan Sosial	1.200.860.300	5.000.000.000	6.000.000.000
1,5	Belanja Bagi Hasil	765.789.850	784.934.596	804.934.596
1,6	Belanja Bantuan Keuangan	103.871.553.700	109.065.131.385	109.165.131.385
2	BELANJA MODAL	74.560.837.931	77.383.585.016	79.386.580.763
2,1	Belanja Modal Tanah	2.470.000.000	2.531.750.000	2.631.750.000
2,3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.302.132.500	21.834.685.813	21.934.685.813
2,4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.225.000.000	21.755.625.000	21.855.625.000
2,5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.328.705.431	26.986.923.067	26.996.923.067
2,6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.235.000.000	1.265.875.000	1.365.875.000
3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	3.008.726.136	4.601.721.883

NO	URAIAN POS BELANJADAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
A.	BELANJA	602.873.269.364	611.165.435.993	623.057.006.831
5.1	BELANJA OPERASI	398.112.804.973	403.112.804.973	410.612.804.973
5.1.01	Belanja Pegawai	228.648.966.074	230.648.966.074	234.148.966.074
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.963.838.899	163.963.838.899	165.963.838.899
5.1.05	Belanja Hibah	3.500.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000	4.000.000.000	5.500.000.000
5.2	BELANJA MODAL	90.800.808.448	90.418.217.076	93.472.209.615
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.731.750.000	2.931.750.000	3.131.750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.134.685.813	26.649.062.476	27.734.685.813
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.655.625.000	24.355.625.000	25.355.625.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.129.883.074	33.245.889.045	33.843.795.662
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.965.875.000	3.056.489.025	3.167.895.540
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	182.989.561	179.401.530	238.457.600
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.485.589.962	5.488.973.735	5.897.926.262
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.485.589.962	5.488.973.735	5.897.926.262
5.4	BELANJA TRANSFER	110.474.065.981	112.145.440.209	113.074.065.981
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	808.934.596	980.308.824	908.934.596
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.665.131.385	111.165.131.385	112.165.131.385



Program prioritas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan agar setiap urusan pemerintahan daerah dapat diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu program pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih menjadi prioritas untuk dianggarkan, namun demikian tidak harus meninggalkan urusan pemerintahan daerah yang lain yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional dan regional.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2021 -2026 berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang).

Program prioritas merupakan bentuk instrument kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing perangkat daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap perangkat daerah ke dalam kegiatan prioritas.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

9



Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas

NO	Program	Indikator		Capaian Program Tahun 2022 (%)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD (Sebelum Perubahan)								Target RPJMD (Setelah Perubahan)								Kondisi Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
		SEBELUM	SESUDAH			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	(Rp)			
						(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target				(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Pusat Pelayanan Keuangan Daerah	Pusat Pelayanan Keuangan Daerah	78%	78%		76%		77%		78%		79%		76%		77%	11.000.000	78%	12.000.000	79%	27.000.000	79%	50.000.000		
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	78%	78%		76%		77%		78%		79%		76%		77%	11.000.000	78%	12.000.000	79%	27.000.000	79%	50.000.000		
		Cakupan P3H per kota KHI anggota Usaha Pengikatan	Cakupan P3H per kota KHI anggota Usaha Pengikatan	50%	50%		76%		77%		78%		79%		76%		77%	11.000.000	78%	11.000.000	79%	26.000.000	79%	48.000.000		
		Penyediaan Kelembagaan (RPPK) yang	Penyediaan Kelembagaan (RPPK) yang																							
		JUMLAH					5.317.982.832		5.317.982.832		5.424.342.489		5.589.199.956		5.876.902.828		5.317.982.832		5.424.342.489		5.589.199.956		5.876.902.828		23.208.428.105	
14	DINAS PERKUBURAN																								DINAS PERKUBURAN	
		TOTAL BELAJAR					3.013.885.510		3.314.444.061		3.348.829.916		3.349.038.802		3.349.839.360		3.314.444.061		3.348.829.916		3.349.038.802		3.349.839.360		13.358.851.839	
		Program Percepatan Utusan Pemerintahan	Nilai Akap Hasil Binaua Inspektoral	78,45	78,45		3.013.885.510	77	3.052.271.560	78	3.102.271.560	79	3.102.271.560	80	3.106.581.004	77	3.052.271.560	78	3.052.271.560	79	3.102.271.560	80	3.106.581.004	80	12.313.395.684	
		Program Penyelenggaraan Lahu Lahu Dan Angkutan	Penyediaan Program Penyelenggaraan Lahu Lahu Dan Angkutan	100%	100%		-	90%	212.172.501	90%	223.258.356	90%	226.766.942	90%	223.258.356	40%	212.172.501	40%	223.258.356	40%	226.766.942	40%	223.258.356	40%	885.456.153	
		Program Pengelolaan Belanja	Penyediaan Program Belanja	90%	90%		-	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	160.000.000	
		Program pengelolaan aset	Penyediaan pengelolaan aset	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program pengelolaan aset	Penyediaan pengelolaan aset	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		JUMLAH					3.013.885.510		3.314.444.061		3.348.829.916		3.349.038.802		3.349.839.360		3.314.444.061		3.348.829.916		3.349.038.802		3.349.839.360		13.358.851.839	
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																								DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		TOTAL BELAJAR					4.021.436.172		4.404.079.789		4.424.794.151		4.408.415.587		4.411.117.731		4.404.079.789		4.424.794.151		4.408.415.587		4.411.117.731		17.648.407.258	
		Program Percepatan Utusan Pemerintahan	Nilai Akap Hasil Binaua Inspektoral	74,15	74,15		2.522.436.172	80	2.522.579.789	80	2.523.794.151	80	2.523.913.587	85	2.523.794.151	80	2.526.579.789	80	2.523.913.587	80	2.523.913.587	85	2.533.117.731	85	10.105.407.258	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyediaan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan penyediaan layanan sesuai dengan strategi	-	-		225.000.000	30,00%	23.000.000	40%	25.000.000	50%	25.000.000	60%	35.000.000	30,00%	25.000.000	40%	25.000.000	50%	25.000.000	60%	25.000.000	60%	100.000.000	
		Penyediaan layanan dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (PKANOM)	Penyediaan layanan dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (PKANOM)	-	-		215.000.000	25,00%	365.000.000	35%	350.000.000	45%	350.000.000	55%	350.000.000	25,00%	365.000.000	35%	350.000.000	45%	350.000.000	55%	350.000.000	55%	1.415.000.000	
		Penyediaan komunikasi masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang masyarakat informasi dan kebijakan	Penyediaan komunikasi masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang masyarakat informasi dan kebijakan	84,61%	84,61%		100.000.000	57,10%	125.000.000	71,40%	150.000.000	85,70%	175.000.000	100,00%	200.000.000	80,00%	125.000.000	85,00%	150.000.000	85,70%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	650.000.000	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan perangkat daerah yang terintegrasi di jaringan kota pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan	5,50%	5,50%		510.000.000	19,40%	902.000.000	22,20%	875.000.000	25%	875.000.000	27,80%	875.000.000	19,40%	902.000.000	22,20%	875.000.000	25%	875.000.000	27,80%	875.000.000	27,80%	3.527.000.000	
		Penyediaan perangkat daerah yang terintegrasi di jaringan kota pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan	Penyediaan perangkat daerah yang terintegrasi di jaringan kota pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan	38,80%	38,80%		130.000.000	24,14%	130.000.000	27,59%	130.000.000	31,03%	130.000.000	34,48%	130.000.000	24,14%	130.000.000	27,59%	130.000.000	31,03%	130.000.000	34,48%	130.000.000	34,48%	520.000.000	
		Penyediaan perangkat daerah yg menggunakan layanan pusat data	Penyediaan perangkat daerah yg menggunakan layanan pusat data	-	-		53.000.000	24,14%	76.500.000	27,59%	116.000.000	31,03%	75.500.000	34,48%	44.000.000	24,14%	76.500.000	27,59%	119.000.000	31,03%	75.500.000	34,48%	44.000.000	34,48%	315.000.000	
		Penyediaan Perangkat Daerah yang terintegrasi di Jaringan Kota Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan	Penyediaan Perangkat Daerah yang terintegrasi di Jaringan Kota Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan	11,10%	11,10%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	75%	85%	90,00%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
		Program Penyelenggaraan Binaua Inspektoral	Terdapatnya buku profil daerah	Ada	Ada		65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	65.000.000	ada	260.000.000	
		Penyediaan kerangka kerja	Penyediaan kerangka kerja	15%	15%		74.000.000	20%	74.000.000	25%	74.000.000	30%	74.000.000	35%	74.000.000	20%	74.000.000	25%	74.000.000	30%	74.000.000	35%	74.000.000	35%	296.000.000	
		Program Penyelenggaraan Pemasalahan Ubah Pemasalahan Informasi	Penyediaan sistem keamanan yang telah menerapkan protokol manajemen yang telah diterapkan protokol manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi pemantauan dan analisis ancaman siber	19,44%	19,44%		90.000.000	33,30%	80.000.000	46,70%	80.000.000	60%	80.000.000	73,30%	80.000.000	33,30%	90.000.000	46,70%	80.000.000	60%	80.000.000	73,30%	80.000.000	73,30%	320.000.000	
		Penyediaan sistem keamanan yang telah menerapkan protokol manajemen yang telah diterapkan protokol manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi pemantauan dan analisis ancaman siber	Penyediaan sistem keamanan yang telah menerapkan protokol manajemen yang telah diterapkan protokol manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi pemantauan dan analisis ancaman siber	19,44%	19,44%		35.000.000	17,20%	35.000.000	24,10%	35.000.000	31%	35.000.000	37,90%	35.000.000	17,20%	35.000.000	24,10%	35.000.000	29%	35.000.000	35,80%	35.000.000	37,90%	140.000.000	
		JUMLAH					4.021.436.172		4.404.079.789		4.424.794.151		4.408.415.587		4.411.117.731		4.404.079.789		4.424.794.151		4.408.415.587		4.411.117.731		17.648.407.258	

NO	Program	Indikator		Capaian Program Tahun 2022 (%)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD (Sebelum Perubahan)								Target RPJMD (Batah Perubahan)								Kondisi Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
		SEBELUM	SEDUHAH			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	[Rp]		
						Target	[Rp]	Target	[Rp]	target	[Rp]	Target	[Rp]	Target	[Rp]	target	[Rp]	target	[Rp]	target	[Rp]				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				24
16 DINAS PERANAMAI MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																									
TOTAL BELAJA						4.283.220.030	4.283.220.030	4.368.884.430	4.501.664.251	4.733.386.455	4.283.220.030	4.368.884.430	4.501.664.251	4.733.386.455	4.283.220.030	4.368.884.430	4.501.664.251	4.733.386.455	17.887.155.166	17.887.155.166	DINAS PERANAMAI MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Nilai Akup Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai Akup Hasil Evaluasi Inspektorat	79,92	79,92	3.458.220.000	3.458.220.030	80	3.443.884.430	80	3.671.664.251	85	3.843.386.455	75	3.458.220.030	80	3.443.884.430	80	3.671.664.251	85	3.843.386.455	85	14.417.155.166			
Program Pengembangan Sistem Perencanaan	Penyelesaian Hasil Rujukan Investasi yang Potensial	Penyelesaian Laporan Evaluasi Perencanaan Fasilitas Investasi	0%	0%	200.000.000	200.000.000	20%	300.000.000	20%	200.000.000	26,67%	250.000.000	20%	200.000.000	20%	300.000.000	20%	200.000.000	26,67%	250.000.000	26,67%	950.000.000			
Program Promosi Perencanaan Modal	Jumlah Investor Berhasil Naikakal PMA dan PMDI	Jumlah Investor Berhasil Naikakal PMA dan PMDI	7 Investor	7 Investor	200.000.000	200.000.000	12 Investor	200.000.000	14 Investor	200.000.000	14 Investor	200.000.000	12 Investor	200.000.000	13 Investor	200.000.000	14 Investor	200.000.000	14 Investor	200.000.000	14 Investor	800.000.000			
Program Pelayanan Perencanaan Modal	Penyelesaian Info Usaha yang diterbitkan sesuai ketentuan	Penyelesaian Perizinan Perizinan dan Non Perizinan	95%	96%	200.000.000	200.000.000	95%	200.000.000	96%	200.000.000	97%	200.000.000	95%	200.000.000	95%	200.000.000	96%	200.000.000	97%	200.000.000	97%	800.000.000			
Program Pengendalian Pelaksanaan	Penyelesaian Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Modal yang diterbitkan sesuai ketentuan	Penyelesaian Pelaksanaan pelaksanaan perizinan dan non perizinan	100%	100%	200.000.000	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000			
Program Pengendalian Pelaksanaan	Penyelesaian Data dan Sistem Informasi Perencanaan Modal yang diterbitkan sesuai ketentuan	Penyelesaian Data dan Sistem Informasi Perencanaan Modal yang diterbitkan sesuai ketentuan	100%	100%	25.000.000	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000			
JUMLAH						4.283.220.030	4.283.220.030	4.368.884.430	4.501.664.251	4.733.386.455	4.283.220.030	4.368.884.430	4.501.664.251	4.733.386.455	4.283.220.030	4.368.884.430	4.501.664.251	4.733.386.455	17.887.155.166	17.887.155.166					
17 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																									
TOTAL BELAJA						3.836.081.475	3.836.081.475	3.912.803.105	4.031.721.630	4.239.253.638	3.836.081.475	3.912.803.105	4.031.721.630	4.239.253.638	3.836.081.475	3.912.803.105	4.031.721.630	4.239.253.638	16.019.859.848	16.019.859.848	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Nilai Akup Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai Akup Hasil Evaluasi Inspektorat	76,99	76,99	3.110.081.475	3.110.081.475	80	3.186.803.105	80	3.110.081.475	85	3.110.081.475	80	3.110.081.475	80	3.110.081.475	80	3.110.081.475	85	3.110.081.475	85	12.517.047.530			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Korpri	Meningkatnya Organisasi Pemuda yang aktif	Meningkatnya Organisasi Pemuda yang aktif	20,39%	20,39%	618.000.000	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	20,39%	618.000.000	100%	2.472.000.000			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Korpri	Meningkatnya Adik yang berpartisipasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Meningkatnya Adik yang berpartisipasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	6 Adik	6 Adik	100.000.000	100.000.000	6 Adik	100.000.000	6 Adik	295.640.155	6 Adik	503.172.163	6 Adik	100.000.000	6 Adik	100.000.000	6 Adik	295.640.155	6 Adik	503.172.163	6 Adik	998.812.318			
Program Pengembangan Kapasitas Korpri	Meningkatnya Kapasitas Korpri	Meningkatnya Kapasitas Korpri	0 Orang	0 Orang	8.000.000	8.000.000	84 Orang	8.000.000	84 Orang	8.000.000	84 Orang	8.000.000	84 Orang	8.000.000	120 Orang	8.000.000	120 Orang	8.000.000	125 Orang	8.000.000	125 Orang	32.000.000			
JUMLAH						3.836.081.475	3.836.081.475	3.912.803.105	4.031.721.630	4.239.253.638	3.836.081.475	3.912.803.105	4.031.721.630	4.239.253.638	3.836.081.475	3.912.803.105	4.031.721.630	4.239.253.638	16.019.859.848	16.019.859.848					
18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN																									
TOTAL BELAJA						2.705.600.852	2.705.600.852	2.759.712.869	2.843.586.495	2.989.959.502	2.705.600.852	2.759.712.869	2.843.586.495	2.989.959.502	2.705.600.852	2.759.712.869	2.843.586.495	2.989.959.502	11.398.859.718	11.398.859.718	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Nilai Akup Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai Akup Hasil Evaluasi Inspektorat	80,22	80,22	2.373.598.852	2.373.598.852	75	2.373.598.852	80	2.373.598.852	85	2.373.598.852	75	2.373.598.852	75	2.373.598.852	75	2.373.598.852	80	2.444.069.495	80	9.725.313.718			
Program Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Buku-Buku yang diterbitkan	Jumlah Buku-Buku yang diterbitkan	1.398 Bpk	1.398 Bpk	4000 Bpk	4000 Bpk	4500 Bpk	4500 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk	5000 Bpk			
Program Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Koleksi buku yang diterbitkan	Jumlah Koleksi buku yang diterbitkan	333 Judul	333 Judul	1.452 Judul	1.452 Judul	1.802 Judul	1.802 Judul	2.152 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul	2.502 Judul			
Program Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Naskah Kuno yang di Akuisisi/ diakh me dia (digitalisasi) /terbit yang ada	Jumlah Naskah Kuno yang di Akuisisi/ diakh me dia (digitalisasi) /terbit yang ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Pengembangan Arsip	Penyelesaian Perangkat Lunak Yang Mengelola Arsip	Penyelesaian Perangkat Lunak Yang Mengelola Arsip	-	-	45.000.000	45.000.000	35%	45.000.000	35%	65.000.000	35%	65.000.000	35%	62.000.000	11%	25.000.000	11%	35.000.000	11%	35.000.000	11%	135.000.000			
Program Pengembangan Arsip	Perkembangan Dan Penyelamatan Arsip	Perkembangan Dan Penyelamatan Arsip	-	-	20.000.000	20.011.000	22%	20.000.000	22%	25.011.000	22%	25.011.000	22%	37.000.000	7	20.011.000	7	25.000.000	7	25.015.000	7	102.000.000			
Program Pelaksanaan Kegiatan	Penelitian dan pengembangan arsip yang beresat tertutup yang dilampai di berbagai kabupaten daerah	Penelitian dan pengembangan arsip yang beresat tertutup yang dilampai di berbagai kabupaten daerah	-	-	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	15.000.000	15.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	1 Dokumen</td <td>10.000.000</td> <td>1 Dokumen</td> <td>15.000.000</td> <td>1 Dokumen</td> <td>15.000.000</td> <td>2 Dokumen</td> <td>22.000.000</td>	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	22.000.000			
JUMLAH						2.705.600.852	2.705.600.852	2.759.712.869	2.843.586.495	2.989.959.502	2.705.600.852	2.759.712.869	2.843.586.495	2.989.959.502	2.705.600.852	2.759.712.869	2.843.586.495	2.989.959.502	11.398.859.718	11.398.859.718					
19 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA																									
TOTAL BELAJA						3.691.375.611	3.691.375.611	3.765.203.123	3.879.635.767	4.079.339.188	3.691.375.611	3.765.203.123	3.879.635.767	4.079.339.188	3.691.375.611	3.765.203.123	3.879.635.767	4.079.339.188	18.415.853.689	18.415.853.689	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Nilai Akup Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai Akup Hasil Evaluasi Inspektorat	80,50	80,50	3.079.774.351	3.079.774.351	80	3.079.774.351	80	3.129.774.351	85	3.193.910.413	80	3.079.774.351	80	3.079.774.351	80	3.129.774.351	85	3.193.910.413	85	12.483.233.466			
Program Pelaksanaan Kerja	Bantuan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Subsidi	Bantuan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Subsidi	0%	0%	250.000.000	250.000.000	12,5%	250.000.000	18,75%	300.000.000	25,00%	350.000.000	31,25%	450.000.000	12,5%	250.000.000	18,75%	300.000.000	25%	350.000.000	31,25%	450.000.000			
Program Pelaksanaan Kerja	Penyelesaian Tenaga Kerja Yang Ditransfer Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah	Penyelesaian Tenaga Kerja Yang Ditransfer Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah	9,11%	9,11%	64.873.900	64.873.900	17,32%	64.873.900	19,68%	64.873.900	22,05%	64.873.900	25,20%	64.873.900	17%	64.873.900	20%	64.873.900	22,05%	64.873.900	25,20%	64.873.900			
Program Hubungan Industri	Penyelesaian Perumahan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PTB/L3S, BIPARTIT, BIPARTIT, BIPARTIT Dan Transfer Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Penyelesaian Perumahan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PTB/L3S, BIPARTIT, BIPARTIT, BIPARTIT Dan Transfer Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0%	0%	45.000.000	45.000.000	85,80%	45.000.000	86,65%	45.000.000	87,05%	45.000.000	88,35%	45.000.000	85%	45.000.000	86,65%	45.000.000	87,05%	45.000.000	88,35%	45.000.000			
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyelesaian Pembangunan Dan Pengalihan Kawasan	Penyelesaian Pembangunan Dan Pengalihan Kawasan	0%	0%	251.727.360	251.727.360	17,54%	251.727.360	19,30%	275.554.873	21,05%	289.987.516	24,56%	325.354.873	17,54%	251.727.360	19,30%	275.554.873	21,05%	289.987.516	25%	325.554.873			
JUMLAH						3.691.375.611	3.691.375.611	3.765.203.123	3.879.635.767	4.079.339.188	3.691.375.611	3.765.203.123	3.879.635.767	4.079.339.188	3.691.375.611	3.765.203.123	3.879.635.767	4.079.339.188	18.415.853.689	18.415.853.689					

NO	Program	Indikator		Capaian Program Tahun 2022 (%)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun 2022	Target RPJMD (Sebelum Perubahan)								Target RPJMD (Batakit Perubahan)								Kondisi Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
		SEBELUM	SESUDAH				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	(Rp)		
							(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target				(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
UNSUB FENILANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
34 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
TOTAL BELANJA						6.103.019.252	6.713.331.177	6.774.351.370	6.780.454.389	6.781.064.691	6.713.331.177	6.813.351.370	6.780.454.389	6.781.064.691	6.713.331.177	6.813.351.370	6.780.454.389	6.781.064.691	6.713.331.177	6.813.351.370	6.780.454.389	6.781.064.691	27.088.201.627			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	84,20	84,20	4.558.575.541	4.797.301.897	80	4.918.089.732	80	4.918.089.732	85	4.918.089.732	80	4.797.301.897	80	4.918.089.732	80	4.918.089.732	85	4.918.089.732	85	4.918.089.732	85	19.551.571.093	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Perencanaan Komakretel dan Sinergi Antar Dekstern Perencanaan	Perencanaan Komakretel dan Sinergi Antar Dekstern Perencanaan	100	100	767.776.939	971.110.274	100	874.443.610	100	877.776.937	100	881.720.576	100%	971.110.274	100%	874.443.610	100%	877.776.938	100%	881.720.576	100%	881.720.576	100%	3.605.051.398		
Program Perencanaan Dan Penganggaran Daerah	Perencanaan Kajian peralihan dan	Perencanaan Kajian peralihan dan	-	-	39.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Perencanaan Dan Penganggaran Daerah	Perencanaan Kajian peralihan dan	Perencanaan Kajian peralihan dan	100	100	155.003.000	324.862.006	-	336.810.028	-	-	100	-	-	100%	324.911.006	-	-	-	-	-	-	-	-	324.911.006		
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan jumlah dekstern perencanaan pembangunan daerah yang ditrapkan sesuai	Perencanaan jumlah dekstern perencanaan pembangunan daerah yang ditrapkan sesuai	100	100	611.624.672	620.008.000	100	645.008.000	100	984.587.720	100	981.254.383	100%	620.008.000	100%	1.020.818.028	100%	984.587.719	100%	981.254.383	100%	981.254.383	100%	3.606.668.130		
JUMLAH						6.103.019.252	6.713.331.177	6.774.351.370	6.780.454.389	6.781.064.691	6.713.331.177	6.813.351.370	6.780.454.389	6.781.064.691	6.713.331.177	6.813.351.370	6.780.454.389	6.781.064.691	6.713.331.177	6.813.351.370	6.780.454.389	6.781.064.691	27.088.201.627			
35 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH																										
TOTAL BELANJA						139.744.350.149	139.840.355.933	140.947.238.355	145.218.979.095	147.198.066.193	138.408.074.983	140.908.238.355	143.159.571.099	144.002.328.704	138.408.074.983	140.908.238.355	143.159.571.099	144.002.328.704	138.408.074.983	140.908.238.355	143.159.571.099	144.002.328.704	566.478.213.107			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	78,75	78,75	24.528.153.832	25.187.773.847	80	25.386.273.847	80	26.103.677.847	85	27.263.011.336	80	23.755.492.847	80	25.347.273.847	80	26.044.273.847	85	27.067.273.847	85	27.067.273.847	85	102.214.314.388	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
Program Pengeluaran Keuangan Daerah	Perencanaan Program Pengeluaran Keuangan	Rasio Anggaran Bias terhadap belanja dalam akun sumber-sumber Manajemen Aset	8,13%	8,13%	112.479.908.467	112.145.704.929	80%	112.965.704.929	80%	116.229.704.929	80%	117.215.704.929	3,0%	112.145.704.929	3,0%	112.965.704.929	3,0%	114.229.704.929	3,0%	114.215.704.929	3,0%	114.215.704.929	3,0%	453.556.819.716		
Program Pengeluaran Barang Milik Daerah	Perencanaan Program Pengeluaran Barang Milik Daerah		YA	YA	936.866.320	836.866.320	YA	936.866.320	YA	1.036.866.320	YA	936.866.320	YA	836.866.320	YA	936.866.320	YA	1.036.866.320	YA	936.866.320	YA	936.866.320	YA	3.747.465.280		
Program Pengeluaran Penetapan Daerah	Perencanaan Program Pengeluaran Penetapan Daerah	RABIO PAD	2,35%	2,35%	1.799.421.530	1.670.010.857	80%	1.658.393.259	80%	1.848.725.999	80%	1.782.483.608	2,35%	1.670.010.857	2,35%	1.658.393.259	2,35%	1.848.725.999	2,35%	1.782.483.608	2,35%	1.782.483.608	80%	6.959.613.723		
JUMLAH						139.744.350.149	139.840.355.933	140.947.238.355	145.218.979.095	147.198.066.193	138.408.074.983	140.908.238.355	143.159.571.099	144.002.328.704	138.408.074.983	140.908.238.355	143.159.571.099	144.002.328.704	138.408.074.983	140.908.238.355	143.159.571.099	144.002.328.704	566.478.213.107			
36 BADAN KEPERAWATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA																										
TOTAL BELANJA						6.261.473.786	6.261.473.786	6.261.473.786	6.574.547.475	6.879.054.273	6.261.473.786	6.261.473.786	6.574.547.475	6.879.054.273	6.261.473.786	6.261.473.786	6.574.547.475	6.879.054.273	6.261.473.786	6.261.473.786	6.574.547.475	6.879.054.273	25.976.549.320			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	75,86	75,86	5.020.949.526	5.020.949.526	100%	4.320.927.526	100%	4.834.031.315	100%	4.732.694.504	80	5.020.949.526	80	5.020.949.526	80	5.334.023.215	85	5.334.023.215	85	5.334.023.215	85	20.909.943.482	BADAN KEPERAWATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	
Program Kepegawaian Daerah	Jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan Adhistrasi dan fungsional tertentu pada	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintahan	NA	100%	954.913.760	954.913.760	100%	954.913.760	100%	954.913.760	100%	954.913.760	251	954.913.760	272	954.913.760	294	954.913.760	315	994.913.760	315	994.913.760	315	3.859.655.040		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan	Rata-rata Lama Pegawai yang mendapatkan pendidikan	4 Tahun	100%	285.610.500	285.610.500	100%	985.604.500	100%	985.604.500	100%	1.151.448.009	26,34%	285.610.500	30,56%	285.610.500	34,57%	285.610.500	38,59%	350.117.298	38,59%	350.117.298	38,59%	1.205.945.798		
JUMLAH						6.261.473.786	6.261.473.786	6.261.473.786	6.574.547.475	6.879.054.273	6.261.473.786	6.261.473.786	6.574.547.475	6.879.054.273	6.261.473.786	6.261.473.786	6.574.547.475	6.879.054.273	6.261.473.786	6.261.473.786	6.574.547.475	6.879.054.273	25.976.549.320			
37 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH																										
TOTAL BELANJA						-	-	-	-	-	-	-	750.000.000	3.912.803.105	4.212.803.105	4.812.803.105	4.812.803.105	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.500.000.000	80	1.500.000.000	80	1.500.000.000	85	1.500.000.000	85	1.500.000.000	85	5.250.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
Program Perencanaan Dan Penganggaran Daerah	Perencanaan Kajian peralihan dan	Perencanaan Kajian peralihan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.412.803.105	100%	2.712.803.105	100%	3.812.803.105	100%	3.812.803.105	100%	3.812.803.105	100%	8.438.409.318		
JUMLAH						-	-	-	-	-	-	-	750.000.000	3.912.803.105	4.212.803.105	4.812.803.105	4.812.803.105	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318	13.688.409.318		
UNSUB PERAWATAN URUSAN PEMERINTAHAN																										
33 INSPEKTORAT																										
TOTAL BELANJA						8.085.962.115	8.085.962.115	8.247.681.357	8.498.346.182	8.935.796.733	8.085.962.115	8.247.681.357	8.498.346.182	8.935.796.733	8.085.962.115	8.247.681.357	8.498.346.182	8.935.796.733	8.085.962.115	8.247.681.357	8.498.346.182	8.935.796.733	33.767.786.387			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	87,66	87,66	4.866.212.115	4.866.212.115	80	4.899.228.880	80	4.899.228.880	85	5.256.045.733	80	4.866.212.115	80	4.899.228.880	80	4.899.228.880	85	4.899.228.880	85	4.899.228.880	85	19.920.716.608	INSPEKTORAT	
Program Penyelenggaraan	Nilai Mutu	Nilai Mutu	Level 3	Level 3	2.070.000.000	2.070.000.000	Level 3	2.198.702.477	Level 3	2.250.000.000	Level 3	2.250.000.000	Level 3	2.070.000.000	Level 3	2.198.702.477	Level 3	2.250.000.000	Level 3	2.250.000.000	Level 3	2.250.000.000	Level 3	8.768.702.477		
Program Pemantauan Kelengkapan, Peningkatan Dan Asistensi	Perencanaan capaian pelaksanaan FKOT	Perencanaan capaian pelaksanaan FKOT	100%	100%	1.149.750.000	1.149.750.000	100%	1.149.750.000	100%	1.429.750.000	100%	1.429.750.000	100%	1.149.750.000	100%	1.149.750.000	100%	1.429.750.000	100%	1.429.750.000	100%	1.429.750.000	100%	5.078.367.302		
JUMLAH						8.085.962.115	8.085.962.115	8.247.681.357	8.498.346.182	8.935.796.733	8.085.962.115	8.247.681.357	8.498.346.182	8.935.796.733	8.085.962.115	8.247.681.357	8.498.346.182	8.935.796.733	8.085.962.115	8.247.681.357	8.498.346.182	8.935.796.733	33.767.786.387			

NO	Program	SEBUTAN	Indikator	2022 (%)		2023 (%)		2024 (%)		2025 (%)		2026 (%)		2027 (%)		2028 (%)		2029 (%)		2030 (%)			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
30	KANTON CAKAT TIVYAN	TOTAL BERKAS	NDA AKT Final Revisi	76,73	76,73	1.098.656,374	90	1.098.656,374	80	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	
		Program	Program	76,73	76,73	1.098.656,374	90	1.098.656,374	80	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	
36	KANTON CAKAT TIVYAN	TOTAL BERKAS	NDA AKT Final Revisi	76,73	76,73	1.098.656,374	90	1.098.656,374	80	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	
		Program	Program	76,73	76,73	1.098.656,374	90	1.098.656,374	80	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	1.648.708,274	
37	REKAMTAM KOTIVYAN	TOTAL BERKAS	NDA AKT Final Revisi	76,99	76,99	1.538.258,234	80	1.538.258,234	80	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	
		Program	Program	76,99	76,99	1.538.258,234	80	1.538.258,234	80	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	1.588.312,234	
38	REKAMTAM REKAMTAM	TOTAL BERKAS	NDA AKT Final Revisi	79,96	79,96	1.773.531,976	80	1.773.531,976	80	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	
		Program	Program	79,96	79,96	1.773.531,976	80	1.773.531,976	80	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	1.815.082,976	
39	REKAMTAM CAKAT MODAYAN	TOTAL BERKAS	NDA AKT Final Revisi	79,68	79,68	1.890.476,414	100%	1.890.476,414	100%	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	
		Program	Program	79,68	79,68	1.890.476,414	100%	1.890.476,414	100%	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	
40	REKAMTAM CAKAT MODAYAN	TOTAL BERKAS	NDA AKT Final Revisi	79,68	79,68	1.890.476,414	100%	1.890.476,414	100%	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	
		Program	Program	79,68	79,68	1.890.476,414	100%	1.890.476,414	100%	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	1.940.536,414	

REKAMTAM CAKAT MODAYAN

REKAMTAM CAKAT MODAYAN

REKAMTAM CAKAT MODAYAN

REKAMTAM CAKAT MODAYAN

NO	Program	Indikator		Capaian Program Tahun 2022 (%)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun 2022 (Rp)	Target RPJMD (Sebelum Perubahan)								Target RPJMD (Setelah Perubahan)								Kondisi Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
		SEBELUM	SESUDAH				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	(Rp)			
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
UNSUR PEMERINTAHAN LUMUT																											
38	BADAN KEBERTUAN BANGSA DAN POLITIK																										
	TOTAL SELAKA					3.055.271.922		3.055.271.922		3.116.377.360		3.211.090.790		3.376.381.001		3.055.271.922		3.116.377.360		3.211.090.790		3.376.381.001				12.759.121.073	BADAN KEBERTUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Penguatan Urusan Pemerintahan	Nilai AKIP Hasil Binahas Inspektoral	Nilai AKIP Hasil Binahas Inspektoral	73,01	73,01	2.164.758.532	80	2.111.236.190	80	2.113.341.625	80	2.139.035.420	80	2.291.196.190	80	2.111.236.190	80	2.113.341.625	80	2.139.035.420	85	2.291.196.190	85	2.291.196.190	85	8.654.829.428	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentasi capaian program penguatan ideologi Pancasila dan	Presentasi capaian program penguatan ideologi Pancasila dan	99%	99%	329.758.843	90%	329.758.843	90%	330.758.843	90%	335.758.843	90%	342.858.843	90%	329.758.843	90%	330.758.842,50	90,00%	335.758.842,50	90%	342.858.842,50	90%	1.339.135.370			
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengambatan Bina	Presentasi capaian Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	Presentasi capaian Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	99%	99%	200.000.000	90%	179.759.024	90%	226.758.843	90%	211.758.843	90%	207.349.402	90%	179.759.024	90%	229.758.842,50	90%	211.758.842,50	90%	207.349.401,50	90%	838.626.111			
	Program Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Presentasi Capaian Program Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi	Presentasi Capaian Program Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi	80%	80%	59.879.421	90%	59.879.421	90%	60.879.421	90%	88.879.421	90%	95.838.303	90%	59.879.421	90%	60.879.421	90%	88.879.421	90%	95.838.303	90%	305.476.567			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Presentasi capaian Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Presentasi capaian Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	99%	99%	100.000.000	90%	144.879.602	90%	134.879.421	90%	194.879.421	90%	198.879.421	90%	144.879.602	90%	154.879.421	90%	194.879.421	90%	198.879.421	90%	693.517.866			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Pengamanan Kerdik	Presentasi capaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Pengamanan Kerdik	Presentasi capaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Pengamanan Kerdik	95%	96%	200.875.127	90%	229.758.843	90%	226.759.205	90%	240.758.843	90%	240.258.843	90%	229.758.843	90%	226.759.204,50	90%	240.758.842,50	90%	240.258.842,50	90%	937.535.733			
	Jumlah					3.055.271.922		3.055.271.922		3.116.377.360		3.211.090.790		3.376.381.001		3.055.271.922		3.116.377.360		3.211.090.790		3.376.381.001			12.759.121.073		



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan parameter “Peningkatan Kualitas Manusia” dan Indikatornya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penetapan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel 8.1 dan tabel 8.2.



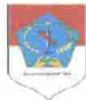
Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2022-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	LPPD (skor)	LPPD (skor)	3,7	2.46	2.46	3,7	3,7	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	SAKIP	SAKIP	80	B	B	80	80	80	80	B	B	B	B	B
3	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	65	C	C	70	72	74	75	B	B	BB	BB	BB
4	Opini BPK	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 3+	Level 3+	Level 3+	Level 3+	Level 3+	Level 3+	Level 3+
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	2.0	2.04	2.04	2.4	2.8	3.2	3.5	2.6	2.6	2,8	2.8	2.8
7	-	Indeks Inovasi Daerah	-	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	-	-	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
8	Persentase Deteksi Dini Konflik SARA Yang Diselesaikan	Persentase Deteksi Dini Kejadian Konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	39,77	39,21	39,21	39,77	39,77	39,77	39,77	39,77	41,08	45,48	45,77	45,77
10	-	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	-	2,039,190	2,039,190	-	-	-	-	2,137,060	2,230,823	2,314,679	2,409,086	2,409,086
11	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	3.90%	0.32%	0.32%	4.00%	4.10%	4.30%	4.50%	0.70%	1.20%	1.70%	2.30%	2.30%
12	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7.80%	9.13%	9.13%	7.82%	7.84%	7.88%	7.95%	8.00%	8.10%	8.20%	8.30%	8.3%



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
13	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	33.62%	33.62%	33.62%	35,22%	36,82%	38,42%	39,22%	34.62%	36.22%	37.82%	39.42%	39.42%
14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,40%	67.21%	67.21%	66,80	67,20	67,60	68,00	66,80	71.00	71.15	71.35	71.35
15	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3%	5.18%	5.18%	3,18%	4%	4.50%	5%	5.2-5.5%	5.7-5.9%	6.0-6.4%	6.6-7.1%	6.6-7.1%
16	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio	<0.4	0.37	0.37	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	0,37	0,35	0.31	0,34	0,34
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.1	6.1	6.1	6	6	6	6	6%	6%	6%	6%	6%
18	Persentase Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5.8	5.8	5.8	5,65	5.3	5	4.9	5,65%	5,3%	5.21-5.25%	4,9%	4,9%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.88	78,55	78.55	68.29	68.7	69.11	69.52	68.29	68.7	69.11	69.52	69.52
20	Prevalensi Stunting	Prevelensi Stunting (EPPGBM)	6	6,99%	6,99%	5%	4%	3%	2%	6%	5%	5%	5%	5%
21		Prevelensi Stunting (SSGI)	-	30%	30%	-	-	-	-	20%	14%	13,9%	13,8%	13,8%
22		Angka Harapan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	69.89 Tahun	70 Tahun	70 Tahun	70 Tahun	70 Tahun
23	Rata - Rata Lama Sekolah	Rata - Rata Lama Sekolah	14	14	14	14	14	14	14	8.23 Tahun	8.43 Tahun	8.63 Tahun	8.83 Tahun	8.83 Tahun
24	-	Harapan Lama Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	11.63	11.65	11.69	11.69	11.69
25	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.9	90.9	90.9	90.95	91	91.25	91.50	90,95%	91%	91,40%	91,50%	91,50%
26	-	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	-	-	-	76,00	78,00	78,00	78,00	78,00
27	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	50.06%	50.06%	50.06%	50.35%	52.75%	55.13%	57.31%	50.35%	52.75%	55.13%	57.31%	57.31%
28	Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum	Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum	73.09%	74.63%	74.63%	74.29%	75.08%	75.42%	76.35%	73.10%	73.11%	73.12%	73.20%	73.20%
29	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	59.80%	61.15%	60.91%	60.16%	60.46%	60.71%	60.91%	60.16%	60.46%	60.71%	60.91%	60.91%
30	Persentase Rumah	Persentase Rumah Layak	85.30%	85.53%	85.53%	85.86%	86.42%	87.13%	87.83%	85.86%	86.42%	87.13%	87.83%	87.83%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Layak Huni	Huni												
31	Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%	40%	60%	80%	100%	100%
32	Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang Menjadi Maju (Menuju Mandiri)	Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Maju Dan Mandiri	11.10%	55.50%	55.50%	33.33%	41.98%	49.38%	58.02%	56.79%	72.84%	79.01%	90.12%	90.12%



8.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah. Adapun indikator kinerja utama perangkat daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Tahun 2021-2026, sebagai berikut.

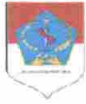
Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	PENDIDIKAN													
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%	85.15%	85.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	1.77	0.10%	0.10%	1,57	1,37	0,17	0,97	1.57	1.37	0.17	0.97	0.97
	Persentase Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	Persentase Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	100%	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kelulusan SD/MI	Persentase Kelulusan SD/MI	100%	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Rata-Rata Nilai UN SD/MI	Angka Rata-Rata Nilai UN SD/MI	60.75	NA	NA	65,00	65,00	70,00	70,00	65	70	70	70	70
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%	72.73%	72.73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	0.75	2.02%	2.02%	0,60	0,40	0,30	0,20	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
	Persentase Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA	Persentase Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA	100%	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kelulusan SMP/MTs/Paket B	Persentase Kelulusan SMP/MTs/Paket B	100%	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	Angka Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	70.5	NA	NA	70,50	70,50	70,50	70,50	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	86.25%	86.25%	100%	100%	100%	100%	90.00%	92.00%	94.00%	96.00%	96.00%



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	APM PAUD	APM PAUD	91,71%	87.21%	87.21%	92,96%	94,21%	95,46%	96,71%	92,96%	94,21%	95,46%	96,71%	96,71%
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,64 Tahun	8.53 Tahun	8.53 Tahun	14 Tahun	14 Tahun	14 Tahun	14 Tahun	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen 1 Kurikulum Muatan Lokal SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Dokumen 1 Kurikulum Muatan Lokal SD/MI dan SMP/MTs	1 Dok	0	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Jumlah Dokumen 1 Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	Jumlah Dokumen 1 Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	1 Dok	0	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Jumlah Guru yang mencapai Nilai PKG minimal 70	Jumlah Guru yang mencapai Nilai PKG minimal 70	70 Guru	63 Guru	63 Guru	70 Guru	70 Guru	70 Guru	70 Guru	70 Guru	70 Guru	70 Guru	70 Guru	280 Guru
	Jumlah Penyelenggaran Pendidikan Dasar yang memperoleh Izin Operasional	Jumlah Penyelenggaran Pendidikan Dasar yang memperoleh Izin Operasional	1 Sekolah	0	0	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
	Jumlah Penyelenggaran Pendidikan PAUD dan PNF yang memperoleh Izin Operasional	Jumlah Penyelenggaran Pendidikan PAUD dan PNF yang memperoleh Izin Operasional	1 PKBM	1 PKBM	1 PKBM	1 PKBM	1 PKBM	1 PKBM	1 PKBM	2 PKBM	2 PKBM	2 PKBM	2 PKBM	2 PKBM
	-	Angka Melek Huruf	-	85,00%	85,00%	-	-	-	-	87,00%	90,00%	93,00%	96,00%	96,00%
2	KESEHATAN													
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1/1000 KH	21/1.119	21/1.119	0.20/100 KH	0.18/100 KH	0.17/100 KH	0.16/100 KH	0.20/100 KH	0.18/100 KH	0.17/100 KH	0.16/100 KH	0.16/1000 KH
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	979.4	1,119	1,119	980.5	981.4	982.4	984	980.5	981.4	982.4	984	984
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,60/1000 KH	1/1.119	1/1.119	0.59/1000KH	0.59/1000KH	0.58/1000KH	0.57/1000KH	0.59/1000 KH	0.59/1000 KH	0.58/1000 KH	0.57/1000 KH	0.57/1000 KH
	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	4.8/1000 KH	20/1.119	20/1.119	2.4/1000KH	1.18/1000KH	1.16/1000KH	1.15/1000KH	2.4/1000 KH	1.18/1000 KH	1.16/1000 KH	1.15/1000 KH	1.15/1000 KH
	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	60/100.000 KH	1/1.119	1/1.119	59/100.000KH	59/100.000KH	58/100.000KH	57/100.000KH	59/100.000 KH	59/100.000 KH	58/100.000 KH	57/100.000 KH	57/100.000 KH



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	75%	63.07%	63.07%	78%	82%	85%	90%	78%	82%	85%	90%	90%
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100%	109%	109%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki Kompetensi Kebidanan	Cakupan Pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki Kompetensi Kebidanan	91%	93.02%	93.02%	93%	95%	97%	97.5%	93%	95%	97%	97.5%	97.5%
	Cakupan Pelayanan Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas	100%	78.99%	78.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Kunjungan Bayi	Cakupan Kunjungan Bayi	78%	94%	94%	81%	85%	90%	92%	81%	85%	90%	92%	92%
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	83%	78.08%	78.08%	85%	90%	90%	95%	85%	90%	90%	95%	95%
	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar) yang digunakan 2100/ KKal /Kapita/ Hari	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar) yang digunakan 2100/ KKal /Kapita/ Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD atau Setingkat	Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD atau Setingkat	76%	100%	100%	3%	2.8%	2.5%	2%	77%	78%	79%	80%	80%
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	100%	100%	100%	0.41%	0.43%	0.47%	0.50%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	65%	77.6%	77.6%	67%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	0.1	263.42	263.42	0.1	238	238	238	266	238	238	238	238



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Tingkat kematian karena Tuberkolosis per 100.000 Penduduk	Tingkat kematian karena Tuberkolosis per 100.000 Penduduk	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	0	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	0	86.71%	86.71%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
	Penderita Diare yang ditangani	Penderita Diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka kejadian malaria	Angka kejadian malaria	0	0	0	0	API <1	API <1	API <1	API <1	API <1	API <1	API <1	API <1
	Tingkat kematian akibat malaria	Tingkat kematian akibat malaria	API <1	0	0	API <1	API <1	API <1	API <1	0	0	0	0	0



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	97.50%	95.10%	95.10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak	Persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak	0	105.40%	105.40%	0	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Rasio Posyandu Per satuan Balita	Rasio Posyandu Per satuan Balita	14%	13.52%	13.52%	15%	16%	17%	18%	15%	16%	17%	18%	18%
	Rasio Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan Penduduk	Rasio Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan Penduduk	0.533	0.06%	0.06%	0.537	0.542	0.546	0.544	0.537	0.542	0.546	0.544	0.544
	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	Cakupan Puskesmas	Cakupan Puskesmas	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%
	Cakupan Puskesmas Pembantu	Cakupan Puskesmas Pembantu	50%	50%	50%	50%	55%	55%	60%	50%	55%	55%	60%	60%
	Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	84%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	55%	35%	35%	56%	56%	57%	58%	56%	56%	57%	58%	58%
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 Jam	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 Jam	0	100%	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio Tenaga Dokter Per satuan Penduduk	Rasio Tenaga Dokter Per satuan Penduduk	0.41	0.25%	0.25%	0.45	0.46	0.52	0.53	0.45	0.46	0.52	0.53	0.53



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Rasio Tenaga paramedis Per satuan Penduduk	Rasio Tenaga paramedis Per satuan Penduduk	0.25	4%	4%	0.46	0.56	0.62	0.63	0.46	0.56	0.62	0.63	0.63
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (JKN)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (JKN)	79.609 Peserta	30,222 Peserta	30,222 Peserta	78000 Peserta	73000 Peserta	70000 Peserta	65500 Peserta	78.000 Peserta	73.000 Peserta	70.000 Peserta	65.500 Peserta	65.500 Peserta
	Rasio daya tampung RS	Rasio daya tampung RS	0.055			0.065	0.086	0.107	0.115	-	-	-	-	-
	Persentasi RS Rujukan	Persentasi RS Rujukan	0%	0	0	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Presentasi Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	Presentasi Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Presentasi Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	Presentasi Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Presentasi bayi baru lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Presentasi bayi baru lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82.20%	100%	100%	83%	85%	87.5%	90%	-	-	-	-	-
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65%	100%	100%	70%	75%	80%	85%	-	-	-	-	-
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55%	100%	100%	57%	58%	60%	62%	-	-	-	-	-



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.5%	100%	100%	37%	38.5%	39.5%	41%	-	-	-	-	-
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29%	100%	100%	32%	34%	36%	38%	-	-	-	-	-
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	65%	100%	100%	67%	69.5%	71%	73%	-	-	-	-	-
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Presentase Desa Dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Presentase Desa Dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	65%	100%	100%	67%	69%	70%	72%	-	-	-	-	-
	Presentase ketersediaan obat, vaksin yang diadakan	Presentase ketersediaan obat, vaksin yang diadakan	81%	85%	85%	84%	87%	90%	93%	-	-	-	-	-
	Jumlah dokumen sertifikat produksi p-irt dan nomor p-irt yang di terbitkan	Jumlah dokumen sertifikat produksi p-irt dan nomor p-irt yang di terbitkan	18 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	20 Dokumen	22 Dokumen	24 Dokumen	26 Dokumen	-	-	-	-	-



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah dokumen tindak lanjut pengawasan post market pada produk makanan dan minuman yang diterbitkan	Jumlah dokumen tindak lanjut pengawasan post market pada produk makanan dan minuman yang diterbitkan	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	35 Dokumen	40 Dokumen	45 Dokumen	50 Dokumen	-	-	-	-	-
	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat dan umot	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat dan umot	24 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	26 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	30 dokumen	-	-	-	-	-
	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	133 paket	2 Paket	2 Paket	134 Paket	135 Paket	136 paket	137 paket	-	-	-	-	-
	Jumlah SDM yang mendapatkan Pelatihan/Bimtek	Jumlah SDM yang mendapatkan Pelatihan/Bimtek	35 Pegawai	0	0	40 pegawai	45 pegawai	45 pegawai	45 pegawai	-	-	-	-	-
	Cakupan Remaja mendapat tablet tambah darah	Cakupan Remaja mendapat tablet tambah darah	54%	100%	100%	56%	58%	60%	62%	56%	58%	60%	62%	62%
	Presentase ibu hamil kekurangan energi kronik	Presentase ibu hamil kekurangan energi kronik	13%	100%	100%	11.50%	10%	9%	8%	11.50%	10%	9%	8%	8%
	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini	62%	100%	100%	66%	70%	74%	78%	-	-	-	-	-
	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan asi eksklusif	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan asi eksklusif	45%	100%	100%	50%	55%	60%	65%	-	-	-	-	-
	Cakupan balita gizi kurang mendapatkan makanan tambahan	Cakupan balita gizi kurang mendapatkan makanan tambahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan	Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien JKN	-	3%	3%	-	-	-	-	3%	2.8%	2.5%	2%	2%



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	48.17%	50.06%	50.06%	50.35%	52.75%	55.13%	57.31%	-	-	-	-	-
	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	87.80%	85.37%	85.37%	90.24%	92.68%	95.12%	100%	90.24%	92.68%	95.12%	100%	100%
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Yang Dimanfaatkan Untuk Pengairan	Persentase panjang jaringan irigasi yang dimanfaatkan untuk pengairan	89.24%	88.99%	88.99%	90.00%	90.75%	91.50%	92.25%	90.00%	90.75%	91.50%	92.25%	92.25%
	Persentase Luas Wilayah Yang Terlindungi Banjir	Persentase Luas Wilayah Yang Terlindungi Banjir	59.58%	63.70%	63.70%	60.61%	61.64%	62.67%	63.70%	60.61%	61.64%	62.67%	63.70%	63.70%
	Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Drainase dalam kondisi baik	9.10%	8.38%	8.38%	9.81%	10.53%	11.25%	11.97%	9.24%	9.48%	9.72%	9.96%	9.96%
	-	Persentase Fasilitas Persampahan yang terbangun (infrastruktur)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	75%	100%	100.00%
	-	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18.77%	31.11%	49.63%	49.63%
	Ketaatan Terhadap RTRW	Ketaatan Terhadap RTRW	99.76%	99.76%	99.76%	99.76%	99.76%	99.76%	99.76%	99.76%	99.76%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN													
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi	59.80%	61.15%	61.15%	60.16%	60.46%	60.71%	60.91%	-	-	-	-	-
	Persentase Fasilitas Persampahan Yang Terbangun (Infrastruktur)	Persentase Fasilitas Persampahan yang terbangun (infrastruktur)	0%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Yang Tertangani	Persentase lingkungan pemukiman kumuh yang tertangani	7.53%	0.79%	0.79%	15.95%	28.58%	43.32%	58.06%	15.95%	28.58%	43.32%	58.06%	58.06%
	-	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	100%



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 jumlah penduduk	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 jumlah penduduk	9:10.000	9:10.000	9:10.000	10:10.000	10:10.000	10:10.000	10:10.000	10:10.000	10:10.000	10:10.000	10:10.000	10:10.000
	Jumlah Patroli Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Patroli Satuan Polisi Pamong Praja	360	360	360	720	1080	1440	1440	720 kali	1080 kali	1440 kali	1440 kali	1440 kali
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota	81 anggota
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	30-90 menit	30-90 menit	30-90 menit	30-60 menit	20-45 menit	20-45 menit	15-30 menit	30-60 menit	20-45 menit	20-45 menit	15-30 menit	15-30 menit
	Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%	-	-	-	-	-
	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	Persentase Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	20%	0	0	40%	60%	80%	100%	40%	60%	80%	100%	100%
	Persentase warga yang ikut pelatihan	Persentase warga yang ikut pelatihan	20%	10%	10%	40%	60%	80%	100%	40%	60%	80%	100%	100%
	Persentase warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persentase warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	-	-	-	40%	60%	80%	100%	-	-	20%	40%	100%
	Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.	Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB,	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB,	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap darurat bencana,	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap darurat bencana,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasiterhadap kejadian bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasiterhadap kejadian bencana	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL													
	Presentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	10%	2%	2%	10%	10%	10%	9%	10%	10%	10%	9%	9%
	Presentasi PSM, TKSK, SLRT/PUSKESOS, KT dan ORSOS yang tertangani	Presentasi PSM, TKSK, SLRT/PUSKESOS, KT dan ORSOS yang tertangani	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentasi PMKS di luar panti sosial tertangani kebutuhan dasarnya.	Presentasi PMKS di luar panti sosial tertangani kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentasi Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tertangani	Presentasi Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0
	Presentasi Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Presentasi Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	-	Jumlah Penduduk Miskin	-	4.320	4.320	-	-	-	-	4320	4170	4020	4020	4020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
7	TENAGA KERJA													
	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	15,75%	10.98%	10.98%	17,32%	19,68%	22,05%	25,20%	17.32%	19.68%	22.05%	25.20%	25.20%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	12,5%	0%	0%	12,5%	18,75%	25%	31,25%	12.50%	18.75%	25%	31.25%	31.25%
	-	Jumlah Pengangguran	-	4.469	4.469	-	-	-	-	2.598	2.008	1.993	1.980	1.980
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	22.73%	94.02%	94.0%	22.75%	22.80%	22.85%	22.90%	60.00%	62.00%	64.00%	66.00%	66.00%
	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan anak	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan anak	31 Kasus	92 Kasus	92 Kasus	30 Kasus	29 Kasus	28 Kasus	27 Kasus	-	-	-	-	-
9	PANGAN													
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,5	93	93	95	95,5	96	96,5	95	95,5	96	96,5	96.5
	Presentasi Penanganan Kerawanan Pangan	Presentasi Penanganan Kerawanan Pangan	96,30%	96.3	96.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentasi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentasi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	94%	90%	90%	97%	98%	99%	99%	97%	98%	99%	99%	99%
10	LINGKUNGAN HIDUP													
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terintegrasi RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	Terintegrasi RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	>50	51.82	51.82	>50	>50	>50	>50	55	55	55	55	55
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	>91	95.32	95.32	>91	>91	>91	>91	96	96	96	96	96
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	>80	86.02	86.02	>80	>80	>80	>80	88	88	88	88	88



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	60%	100%	100%	70%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	18%	21%	21%	18%	18%	43%	54%	24%	25%	43%	54%	54%
	Persentase Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	Persentase Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	23%	22.5%	22.5%	23%	23%	50%	65%	23%	23%	45%	50%	50%
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persentase jumlah sampah yang tertangani	18%	21%	21%	18%	18%	43%	54%	24%	25%	43%	54%	54%
	Operasional TPA/TPST/SPA di Kabupaten	Operasional TPA/TPST/SPA di Kabupaten					Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71		Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71
11	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAATN SIPIL													



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Rasio Penduduk Ber Ktp Per Satuan Penduduk	Rasio Pemduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	20%	81.05%	81.05%	20%	20%	20%	20%	82%	85%	87%	90%	90%
	Presentasi Perekaman KTP-Elektronik	Presentasi Perekaman KTP Elektronik	20%	80.37%	80.37%	20%	20%	20%	20%	82%	85%	87%	90%	90%
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	81%	81%	0%	0%	0%	0%	82%	85%	87%	90%	90%
	Presentasi Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kia	Presentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari Yang Memiliki KIA	80%	41.86%	41.86%	85%	87%	90%	98%	50%	60%	70%	80%	80%
	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0%	90.88%	90.88%	0.00%	0	0	0	98%	98%	98%	98%	98%
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	98%	100.00%	100.00%	85%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio Pasangan Berakte Nikah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Penerbitan Akta Perkawinan	Presentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Penerbitan Akta Perceraian	Presentase Penerbitan Akte Perceraian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Penerbitan Akta Kematian	Presentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Penyajian Data Kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokumen
	-	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		sudah	sudah	-	-	-	-	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	Persentase peningkatan status desa Berkembang menjadi Maju (Menuju Mandiri)	Persentase peningkatan status desa Berkembang menjadi Maju (Menuju Mandiri)	11.10%	55.50%	55.50%	14.80%	18.50%	22.20%	24.60%	56.79%	72.84%	79.01%	90.12%	90.12%
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase pengentasan desa tertinggal	20.90%	0%	0%	18.50%	17.20%	14.80%	12.30%	0%	0%	0%	0%	0%



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	5 DESA	6 DESA	6 DESA	5 DESA	10 DESA	10 DESA	10 DESA	6 DESA	8 DESA	10 DESA	12 DESA	12 DESA
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	49%	120%	120%	61.70%	74.70%	86.40%	100%	61.70%	74.70%	86.40%	100%	100%
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi	14.80%	19.70%	19.70%	18.50%	19.70%	27.10%	34.50%	18.50%	19.70%	27.10%	34.50%	34.50%
13	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	Rata Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga	2,6 Anak	2.1 Anak	2.1 Anak	2,5 Anak	2,4 Anak	2,3 Anak	2 Anak	2,5 Anak	2,4 Anak	2,3 Anak	2 Anak	2 Anak
	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	80%	103%	103%	81%	83%	84%	85%	81%	83%	84%	85%	85%
	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	16,9 Kelahiran	17.9 Kelahiran	17.9 Kelahiran	13,9 Kelahiran	12,5 Kelahiran	11,2 Kelahiran	10 Kelahiran	13,9 Kelahiran	12,5 Kelahiran	11,2 Kelahiran	10 Kelahiran	10 Kelahiran
	Cakupan PUS Yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet need)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	11%	14.99%	14.99%	10,50%	10%	9%	8%	10,50%	10%	9%	8%	8%
	Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	29%	25.48%	25.48%	31%	32%	33%	35%	31%	32%	33%	35%	35%
	Cakupan Anggota Kelompok Kegiatan Yang Ber KB	Cakupan anggota Kelompok kegiatan yang ber KB	77%	78%	78%	77,50%	78%	79%	80%	77,50%	78%	79%	80%	80%

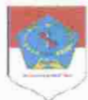


NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	45%	50%	50%	50%	55%	60%	60%	50%	55%	60%	60%	60%
14	PERHUBUNGAN													
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	550	475	475	600	650	700	750	600	650	700	750	750
	Pemasangan Rambu Rambu	Pemasangan Rambu Rambu	20%	0.00%	0.00%	40%	60%	80%	100%	40%	60%	80%	100%	100%
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	<60	27.83	27.83	<70	<70	<75	<75	<70	<70	<75	<75	<75
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	0.20%	0.24%	0.24%	0.25%	0.25%	0.30%	0.35%	0%	0.25%	0.30%	0.35%	0.35%
15	KOMUNIKASI DAN INFORMASI													
	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	2.0	2.04	2.04	2.4	2.8	3.2	3.5	-	-	-	-	-
	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	45%	84.61%	84.61%	50%	55%	60%	65%	50%	55%	60%	65%	65%
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	66.67%	92.30%	92.30%	73.33%	80%	86.67%	93.33%	100%	100%	100%	100%	100%



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Persentase organisasi perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase organisasi perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	16,70%	5,5%	5,5%	19,40%	22,20%	25%	27,80%	100%	100%	100%	100%	100%
	-	Persentase Prganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	-	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	25%
16	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH													
	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	28,5%	100%	100%	33,3%	38,09%	42,85%	47,6%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95,7	91,11%	91,11%	96%	97,6	98,2	98,8	96%	97,6	98,2	98,8	98,8
17	PENANAMAN MODAL													
	Nilai realisasi Investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN	Nilai realisasi Investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN	924,587 M	268,498 M	268,498 M	924,587 M	924,587 M	924,587 M	924,587 M	250 M	275 M	305 M	350 M	350 M
	Persentase Hasil Kajian Investasi Yang Potensial	Persentase Hasil Kajian Investasi yang Potensial	6,67 %	0%	0%	13,33 %	20%	20%	20%	20%	20%	20%	26,67%	26,67%
	Jumlah Investor Beskala Nasional PMA dan PMDN	Jumlah Investor Beskala Nasional PMA dan PMDN	10 Investor	7 Investor	7 Investor	11 Investor	12 Investor	13 Investor	14 Investor	12 Investor	13 Investor	14 Investor	15 Investor	15 Investor
	Persentase Izin Usaha Yang Diterbitkan Sesuai Standar Dan Tepat Waktu	Persentase Izin Usaha yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu	95%	96%	96%	95%	95%	96%	96%	95%	95%	96%	97%	97%
	Persentase Pengendalian Pelaku Usaha Yang Ditindaklanjuti	Persentase Pengendalian Pelaku Usaha yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Dikelola	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	20,39%	20,39%	20,39%	20,39%	21,36%	21,36%	22,33%	20,39%	21,36%	21,36%	22,33%	22,33%
	Presentase Wirausaha Muda	Presentase Wirausaha Muda	9,81%	9,81%	9,81%	9,98%	10,9%	10,28%	10,63%	9,98%	10,9%	10,28%	10,63%	10,63%
	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	40%	40%	40%	60%	80%	90%	100%	60%	80%	90%	100%	100%
	Cakupan Pembinaan Atlit Muda	Cakupan Pembinaan Atlit Muda	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit	10 Atlit
	Jumlah Atlit Berprestasi	Jumlah Atlit Berprestasi	6 Atlit	6 Atlit	6 Atlit	12 Atlit	16 Atlit	20 Atlit	24 Atlit	12 Atlit	16 Atlit	20 Atlit	24 Atlit	24 Atlit
	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	6 Cabang Olahraga	3 Cabang Olahraga	3 Cabang Olahraga	4%	5%	6%	8%	6 Cabang Olahraga	8 Cabang Olahraga	10 Cabang Olahraga	10 Cabang Olahraga	10 Cabang Olahraga
19	STATISTIK													
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	PERSANDIAN													
	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	26.2	26.2	26.2	26.8	27.2	27.6	28	26.8	27.2	27.6	28	28
21	KEBUDAYAAN													
	Jumlah tradisi lokal yang dilestarikan	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2 Seni Budaya	2 Seni Budaya	2 Seni Budaya	2 Seni Budaya	2 Seni Budaya	2 Seni Budaya	2 Seni Budaya	2 Kebudayaan	2 Kebudayaan	2 Kebudayaan	2 Kebudayaan	2 Kebudayaan
	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Festival Seni	1 Festival Seni	100%	100%	100%	100%	100%	1 Festival Seni	1 Festival Seni	1 Festival Seni	1 Festival Seni	1 Festival Seni



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggal Sejarah	1 Sejarah Lokal	0	1 Sejarah Lokal	1 Sejarah Lokal	1 Sejarah Lokal	1 Sejarah Lokal	1 Sejarah Lokal	10%	15%	20%	25%	25%
	Jumlah Peraturan daerah Tentang Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB
	Jumlah Museum yang dikelola	Jumlah Permuseuman yang dikelola dengan baik	0	0	1 Museum	1 Museum	1 Museum	1 Museum	1 Museum	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit
22	PERPUSTAKAAN													
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	2500 Orang	500 Orang	500 Orang	3000 Orang	3500 Orang	4000 Orang	4500 Orang	750 Orang	1.000 Orang	1.250 Orang	1.500 Orang	1.500 Orang
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	3560 Exp	1398 Exp	1398 Exp	4060 Exp	4560 Exp	5060 Exp	5560 Exp	1.500 Buku	2.000 Buku	2.500 Buku	3.000 Buku	3.000 Buku
	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Daerah	1102	323 Judul	323 Judul	1452 Judul	1802 Judul	2152 Judul	2502 Judul	400 Judul	425 Judul	450 Judul	475 Judul	475 Buku
23	KEARSIPAN													
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan	35%	-	-	35%	35%	35%	35%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	-	Persentase Jumlah SKPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Tertib/Baku	35%	-	-	35%	35%	35%	35%	11%	11%	11%	11%	11%
URUSAN PILIHAN														
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	8.968,80 ton	12.830,63 ton	12.830,63 ton	9.417,24 ton	9.888,11 ton	10.382,51 ton	10.901,64 ton	12.830,63 ton	12.762,31 ton	13.498,56 ton	15.827,69 ton	15.827,69 ton
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	685,12 ton	715,34 ton	715,34 ton	0	745,75 ton	768,12 ton	791,16 ton	715,34 ton	823,70 ton	915,78 ton	1.011,51 ton	1.011,51 ton
	Jumlah Produksi Benih Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Benih Perikanan Budidaya	200.000 ekor	110.000 ekor	110.000 ekor	2.000.000 ekor	3.000.000 ekor	4.000.000 ekor	5.000.000 ekor	110.000 ekor	120.000 ekor	130.000 ekor	140.000 ekor	140.000 ekor
25	DINAS PARIWISATA													



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Lama Kunjungan Wisata	Lama kunjungan wisata	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari
	PAD Sektor Pariwisata	PAD sektor Pariwisata	1.45%	0.18%	0.18%	1.53%	1.61%	1.68%	1.79%	0.30%	0.37%	0.41%	0.55%	0.55%
26	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN													
	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani	100	102%	102%	100%	100%	100%	100%	90	91	92	93	93
	Kontribusi Sector Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0	34%	34%	0%	0%	0%	0%	34.62%	36.22%	37.82%	39.42%	39.42%
	Kontribusi Sector Pertanian (palawija) Terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	100%	18.38%	18.38%	100%	100%	100%	100%	18.38%	20.67%	22.75%	24.67%	24.67%
	Kontribusi Sector Perkebunan (tanamankeras) Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	100%	24.63%	24.63%	100%	100%	100%	100%	25.62%	26.63%	28.46%	30.14%	30.14%
	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB	Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap PDRB	100%	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	DIHAPUS
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Ha	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Ha	100%	5,560 Ton/Ha	5,560 Ton/Ha	100%	100%	100%	100%	5,160 Ton/Ha	5,170 Ton/Ha	5,180 Ton/Ha	5,190 Ton/Ha	5,190 Ton/Ha
	Cakupan Bina Kelompok Petani	Cakupan bina kelompok petani	100%	10.57%	10.57%	100%	100%	100%	100%	6.96%	8.13%	9.29%	10.45%	10.45%
27	PERDAGANGAN													
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7.80%	9.13%	9.13%	7.82%	7.84%	7.88%	7.95%	8.00%	8.10%	8.20%	8.30%	8.3%
28	PERINDUSTRIAN													
	Persentase Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	14.8%	1.15%	1.15%	15.0%	15.3%	15.9%	16.5%	4.0%	4.1%	4.2%	4.3%	4.3%
29	TRANSMIGRASI													
	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman Dan Peningkatan Kemampuan/SDM Warga Transmigrasi	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman Dan Peningkatan Kemampuan/SDM Warga Transmigrasi	13.33%	0.00%	0.00%	13.33%	20.00%	26.67%	26.67%	0.00%	20.00%	26.67%	26.67%	26.67%



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Besaran Pekerja / Buruh Yang Menjadi Program Jamsostek	Besaran Pekerja / Buruh Yang Menjadi Program Jamsostek	84.96%	78%	78%	85.80%	86.65%	87.05%	88.35%	85.80%	86.65%	87.05%	88.35%	88.35%
	Peningkatan Penyelesaian Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Peningkatan Penyelesaian Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	12.05%	0%	0%	25.00%	31.25%	18.75%	12.05%	25.00%	31.25%	18.75%	12.05%	12.05%
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
30	PERENCANAAN DAN KEUANGAN													
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Penetapan APBD	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Rasio PAD	Peningkatan Target dan Realisasi PAD	16,875,285,912	12,582,797,491	12,582,797,491	17,719,051,258	17,929,051,258	18,191,551,258	18,506,551,258	12,897,367,428	13,219,801,614	17,975,286,912	18,375,286,912	18,375,286,912
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Meningkatnya Penjabaran Konsistensi Rencana Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Mewujudkan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	85%	85%	90%	90%
	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan keuangannya sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang bebas temuan material	Persentase Perangkat Daerah yang bebas temuan material	83%	83%	83%	86%	88%	91%	91%	86%	88%	91%	91%	91%
	Persentase Perangkat Daerah yang nilai akipnya minimal BB	Persentase Perangkat Daerah yang nilai akipnya minimal BB	52%	52%	52%	66%	80%	94%	100%	66%	80%	94%	100%	100%
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan sistem pengendalian internal	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan sistem pengendalian internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase APIP Bersertifikat	Persentase APIP Bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	82%	82%	82%	83%	84%	85%	86%	83%	84%	85%	86%	86%
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (MCP) (Monitoring Centre for Prevention)	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (MCP) (Monitoring Centre for Prevention)	55%	55%	55%	60%	65%	70%	75%	60%	65%	70%	75%	75%
31	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	-	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	0	100%	100%	100%	100%
	-	Persentase dan Implementasi Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	0	100%	100%	100%	100%
32	KEPEGAWAIAN													
	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Kegiatan Pendidikan Struktural	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Kegiatan Pendidikan Struktural	41,11%	64,52%	64,52%	55,75%	70,38%	85,02%	100%	55,85%	71,55%	85,51%	100%	100%
	Rasio Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (Presentase tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Rasio Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (Presentase tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	89,70%	727,49%	727,49%	92,70%	95,70%	98,00%	100%	473,10 %	759,65 %	1619,30 %	9.800%	9.800%
33	MANAJEMEN KEUANGAN													
	Persentase SILPA	Persentase SILPA	3%	8.13%	8.13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TAHUN 2022		KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)				KONDISI AKHIR
	SEBELUM	SESUDAH	TARGET	CAPAIAN		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	60-40	60-40	60-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
34	TRASPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK													
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Baik	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Baik	50%	100%	100%	55%	60%	65%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik	25%	100%	100%	30%	35%	35%	40%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terintegrasinya Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Terintegrasinya Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2022			KONDISI AWAL	TARGET (SEBELUM PERUBAHAN)				TARGET (SETELAH PERUBAHAN)			KONDISI AKHIR	
		SEBELUM	SESUDAH	TARGET		CAPAIAN	2023	2024	2025	2026	2023	2024		2025
	Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82,64	82,64	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-	Indeks Kepuasan Masyarakat / keithan yang ditindaklanjuti	Presentase pengaduan / Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB IX PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi Misi Bapak Bupati Dr (c) Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si dan Wakil Bupati Bapak Oskar Manoppo, SE MM, yang hendak dicapai dalam lima tahun.

Perubahan RPJMD ini pada prinsipnya sebagai dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang selain merupakan hasil evaluasi RPJMD 2021-2026 yang disusun pada masa pandemic, Perubahan RPJMD ini juga mengakomodasi semua program perangkat daerah setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru efek dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkintan)

Perubahan RPJMD ini juga disusun melalui berbagai pertimbangan dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013-2033 serta beberapa peraturan strategis dan terkait lainnya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun sisa periode.

Program dan Kegiatan dalam RPJMD ini, dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode



selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 ini ditentukan oleh komitmen seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Komitmen tersebut diwujudkan dengan sikap konsistensi Perangkat Daerah dalam mempedomani dan mengejawantahkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini ke dalam Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah yang akan dirubah dan dijadikan acuan didalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang aman, berbudaya, sejahtera dengan sinergitas pembangunan perdesaan dan selalu berpegang teguh pada motto leluhur Mototompiaan, Mototabian, Mototanoban, Mobobangkalan bo Mooaheran.

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**


SAM SACHRUL MAMONTO